

**ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

SITTI MARYAM BAHRI

E 121 13 025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Yang disusun oleh

Sitti Maryam Bahri

E 12113025

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 17 November 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.
NIP.19570707 198403 1 003


Pembimbing II



Rahmatullah S.IP, M.Si
NIP.19770513200312 1 002

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Politik
Dan Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP.19630912 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sitti Maryam Bahri

E 12113025

Telah Diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Jumat Tanggal 17 November 2017

Menyetujui

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Nurlina, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(.....)
Anggota	: A. Lukman Irwan, S.IP, Msi	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur dalam Mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) serta bagaimanaperan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang

setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ibunda Haenang dan Ayahanda Bahri yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.

5. Bapak Dr. Rasyid Thaha, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, terima kasih atas masukan dan arahnya.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf tata usaha Pak Mursalim, Ibu Hasna, Ibu Nanna pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus kelengkapan administrasi.
10. Seluruh informan penulis di Kabupaten Luwu Timuryakni Kepala Dinas DPMD, penyelenggara pemerintahan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa, Kepala Desa Tarengge beserta jajarannya, dan

Kepala Desa Bangun Jaya beserta Jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

11. Kakak tersayang, Riri yang telah menjadi saudara yang paling perhatian dan menjadi saudara laki-laki yang terus mengayomi adik perempuannya. Terima kasih atas bantuan moril dan materil yang tiada hentinya.
12. Kepada saudara-saudara Ibunda tercinta, Om dan Tante penulis yang selalu bangga terhadap segala sesuatu yang penulis raih dan yang telah banyak membantu penulis dalam proses awal penelitian hingga berakhir Tante Rinang, Tante Ruha, Tante Ceceng, Tante Rosma dan terkhusus Alm. Om Kasim terimakasih atas segala motivasi yang tidak akan pernah penulis lupakan, semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah SWT.
13. Kepada sepupu-sepupu penulis yang juga tidak hentinya memberi semangat dan menghibur dalam segala hal kak Anna, kak Ikhwa, kak Ria, Rihla, Mita, Hayyul, dan Buyung.
14. Kepada Sahabat-sahabat penulis, Febriyanti Fajri yang selalu ada saat dikala penulis membutuhkan bantuan, Sri Wulandari yang telah banyak menemani penulis dalam pengumpulan data, Yusriah Amaliah yang telah banyak memberi pelajaran dan pengalaman kepada penulis, Ike Dwiyanti yang selalu menghibur dan menjadi teman curhat penulis dan Dewi Puspitasari yang telah banyak

memberikan nasehat-nasehat kepada Penulis. Terima kasih atas keberadaan kalian dalam hidup penulis.

15. Untuk teman-teman yang telah melanjutkan pendidikan tingkat Strata 2 yaitu, Fitra, Afni dan Karina. Terima kasih atas waktu dan dorongannya selama ini.
16. Saudara-saudara tak sekandung penulis, *Lebensraum*, yaitu Ketua Angkatan Hasyim, Alif, Anti, Azura, Dirga, Cana, Jusna, Iva, Kak Uni, Sundari, Salvia, Betrix, Tami, suci, Mega, Suna, Ulfi, Uceng, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Dina, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hillary, Mustika, Ina, Irma, Jay, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Dandi, Supe, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, dan Ayyun yang telah menemani selama kurang lebih 4 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Terkhusus untuk Alm. Iis terima kasih atas pelajaran hidup yang telah kau titipkan. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga.
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.

18. Keluarga Besar Pengurus Bem Kema FISIP Unhas periode 2017, terima kasih atas kesempatan belajar dan kesempatan berkarya untuk penulis. Salam Biru Kuning. Bersama, Bersatu, Berjaya.
19. Keluarga Besar UKM Pencak silat Panca Suci Fisip Unhas, yang telah memberikan pengalaman baru, keluarga baru dan pengetahuan baru bagi penulis.
20. Kanda Rewo, kakak sekaligus teman curhat penulis terima kasih atas wejangan-wejangannya selama ini.
21. Kepada teman-teman SMAN 1 Mangkutanayang sampai sekarang masih bersama.
22. Sahabat kecil penulis, Nahar dan Dewi terima kasih atas dorongan dan semangatnya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai akhir hayat.
23. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Jeneponto Kecamatan Rumbia, khususnya Posko Desa Kassi teman serumah selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Kordes Ippang, Emil, Ekio, Ani dan sakina, dan Ibu Desabeserta seluruh masyarakat Desa Kassi. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

Makassar, November 2017.

DAFTAR ISI

Sampul	
Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Penerimaan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Intisari	xiv
Abstrak.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Konsep Analisis	11
2.3 Konsep Desa	12
2.4 Konsep Desa Mandiri.....	14
2.5 Konsep Desa Membangun Ekonomi.....	19
2.6 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	23

2.7 Kerangka Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	35
3.2 Tipe dan dasar Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Informan Penelitian	41
3.5 Sumber Data	42
3.6 Objek Penelitian.....	42
3.7 Definisi Operasional.....	43
3.8 Pengumpulan Data	44
3.9 Sajian Data	45
3.10 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Daerah Penelitian	47
4.2 Gambaran Umum BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.	67
4.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur	76
4.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur	100
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur	56
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	57
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.	58
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4.5	Mata Pencaharian.....	64
Tabel 4.6	Kewarganegaraan.....	66
Tabel 4.7	Agama atau Aliran Kepercayaan	66
Tabel 4.8	Mata Pencaharian Pokok	67
Tabel 4.9	Jumlah BUM Desa yang Terdaftar di Kabupaten Luwu Timur	69
Tabel 4.10	Jumlah BUM Desa yang Berjalan di Kabupaten Luwu Timur	76
Tabel 4.11	Indikator Kinerja DPMD Terkait Lembaga EkonomiDesa.....	103
Tabel 4.12	Buku Kas Umum	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	38
Gambar 4.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	55
Gambar 4.2 Grafik Produksi padi menurut Kecamatan di Kab. Luwu Timur tahun 2013	88
Gambar 4.3 Produksi perkebunan rakyat kelapa sawit menurut kecamatan (ton) tahun 2013.....	89

INTISARI

Sitti Maryam Bahri, Nomor Induk Mahasiswa **E12113025**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur, dibawah bimbingan Bapak Prof. Rasyid Thaha, M. Si. sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi peluang pembentukan BUM Desa serta peran atau usaha Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dari dua Desa yang menjadi sampel yaitu Desa Bangun Jaya dan Desa Tarengge masing mempunyai Faktor-faktor yang menjadi peluang untuk mendorong pembentukan BUM Desa, tapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan efektif karena kurangnya pengetahuan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi tersebut serta analisispendalaman potensi secara ilmiah terkait peluang yang ada di tiap Desa belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, adapun analisis untuk pembentukan tersebut diserahkan ke tiap-tiap Desa. Kedua, dengan berlandaskan Undang-undang yang ditopang oleh Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mewajibkan Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa. Adapun usaha yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa dengan memberikan hibah melakukan pendampingan teknis dan memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya Alam.

A B S T R A C T

Sitti Maryam Bahri, Student Identity Number E12113025, Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled Analysis of Establishment of Village Owned Enterprise (BUM Desa) in East Luwu Regency, under the guidance of Prof. Rashid Thaha, M. Si. as mentor I and Mr. Rahmatullah, S.IP, M.Si. as mentor II.

This study aims to determine the opportunities for the establishment of BUM Desa and the role or business of the Regional Government in the formation (BUM Desa) in East Luwu regency. To achieve these objectives used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique. This research aim to know the opportunity of BUM Desa formation and also role or effort of Local Government in establishment (BUM Desa) in East Luwu Regency. To achieve these objectives used qualitative research methods by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, and document and archive by using qualitative descriptive analysis technique.

The results showed: First, from two villages sampled Bangun Jaya Village and Tarengge Village have Factors which become an opportunity to encourage the establishment of BUM Desa, but in its implementation still not run effectively because of lack of knowledge, creativity and innovation of society and government The village in developing the potential and scientifically deepening analysis of potential opportunities in each village has not been undertaken by the local government of East Luwu regency, while the analysis for the establishment is submitted to each village. Secondly, based on the Law underpinned by the Regional Regulation, the East Luwu District Government requires the Village to establish and establish the Village BUM. The efforts undertaken by Local Government in realizing the formation of BUM Desa by providing grants to technical assistance and prioritize the management of Natural Resource.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat, di Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori tertinggal. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur Indonesia. Indikator tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, memiliki mayoritas penduduk yang miskin, belum mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang tidak terkelola dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan untuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Desa.

Kini Desa menghadapi era baru. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan Desa sebagai penyangga

kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pada PP nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat Desa untuk berubah. Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra Desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan Desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan Desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam undang-undang mengatur bahwa pemerintah Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan-perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di Desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. Walaupun

seyogyanya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itu perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi Desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan Desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan Desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementrian Desa PD TT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selain itu Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Definisi kewenangan lokal berskala Desa dalam pasal 1 angka 4 permendesa tersebut adalah:

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.

Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa.

Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses namun ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran stake holder sangat berpengaruh

terhadap pengelolaan dan perkembangan BUM Desa. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Efektifitas pendirian BUM Desa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Hal dasar yang dicita-citakan BUM Desa adalah untuk mensejahterkan seluruh masyarakat Desa. Hal itu pula yang menjadi pendorong pemerintah di Kabupaten Luwu Timur untuk menjalankan secara efektif dan menyeluruh.

kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan dan 124 Desa. Data awal yang didapatkan oleh penulis terdapat tujuh BUMDesa yang terdaftar SIMBUMDES Sulawesi Selatan dan dua BUM Desa yang belum terdaftar. Dari data tersebut terlihat bahwa pendirian BUMDesa di kabupaten luwu timur belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mewujudkan Desa mandiri diharapkan kerjasama *stakeholder* yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDesa, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus

turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan BUM Desa diyakini akan membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat Desa itu sendiri.

Hal itu didorong oleh salah satu misi dari Pemerintah kabupaten Luwu timur yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya. Menurut analisis penulis dengan terealisasinya fungsi BUM Desa akan mewujudkan misi dari pemerintah kabupaten terkhusus dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data awal yang didapatkan penulis kabupaten Luwu Timur memiliki enam dimensi yang menjadi potensi berdasarkan karakteristik wilayahnya. Adapun potensi tersebut meliputi:

1. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian.
2. Potensi hutan dan kekayaan hutan yang masih beragam dan cukup tersedia sejalan dengan visi kabupaten. Potensi ini dapat dikembangkan untuk usaha agribisnis dan bisnis kehutanan. Dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan hutan kabupaten Luwu Timur mencapai
3. Tingkat perkembangan antar kecamatan yang cukup merata. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana ditiap kecamatan

cukup merata, khususnya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan peribadatan.

4. Potensi sekitar pertambangan, dimana sektor ini merupakan sektor yang sangat memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB kabupaten Luwu Timur.
5. Kawasan wisata yang tersebar hampir diseluruh kecamatan.
6. Kabupaten Luwu Timur masih mengandalkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat.

(Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Timur)

Berdasarkan gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur diatas akan menjadi tolak ukur pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dan hal itu pula yang melatar belakangi penulis mengangkat judul “**Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur**” untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha atau proses yang telah ditempuh dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa secara merata dan peran serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah dikemukakan pada latar belakang yang berisi tentang pengalaman langsung serta hasil penelusuran awal penulis terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di kabupaten Luwu Timur, maka dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas , maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi potensi pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui perandan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan berdirinya BUM Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mampu menganalisis tentang permasalahan yang ada di Pemerintahan lingkup kecil (Desa) khususnya di lembaga BUM Desa.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah kabupaten luwu timur dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa serta untuk pemerintah desa secara khusus.

3. Manfaat metodologis

Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan maupun kajian yang sama namun lebih mendetail pelaksanaannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada.

Sebelum melakukan penelitian, perlu mengemukakan teori-teori sebagai landasan konsep serta kerangka fikir untuk menggambarkan dari sudut pandang mana penelitian menyoroti masalah yang diangkat. Sugiono (2005: 55) menyatakan landasan teori perlu di tegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Berikut konsep yang berkaitan dengan judul penulis.

2.1.2 Konsep Analisis

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai

bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Adapaun konsep analisis menurut para ahli adalah sebagai beriku:

- a. Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.
- b. Menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.

2.1.3 Konsep Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan keseherhanaannya. Ada beberapa istilah desa, misalnya *gampong* (Aceh), *kampung* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *huta* (Batak). Berikut adalah pengertian desa menurut para ahli kependudukan dan undang-undang.

- a. R.Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

- b. P.J Bournen, Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.
- c. R.H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. UU No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

- f. UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Konsep Desa Mandiri

Kemandirian Desa secara konseptual identik dengan otonomi Desa. Tetapi undang-undang Desa hanya mengenal Desa mandiri atau kemandirian Desa. Konsep otonomi desa sengaja dihilangkan oleh Undang-undang Desa. Mengapa? Konsep otonomi Desa sebenarnya sudah lama dikenal dalam perbincangan akademik, politik dan bahkan juga dikenal dalam regulasi-regulasi sebelumnya.

Berdasarkan tafsir atas konstitusi dan pengalaman sejarah yang panjang, banyak ilmuwan sosial di masa lalu telah memperkenalkan konsep “otonomi asli” yang melekat pada Desa atau sebutan-sebutan lain seperti nagari , gampong, marga, lembang, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum pedata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1962; T.Ndraha, 1991; HAW Widjaja, 2003). Susunan asli dan hak asal-asul atau sering disebut hak bawaan atau hak purba merupakan jantung konsep otonomi asli Desa. Konsep otonomi Desa sebenarnya muncul dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Dalam penjelasan UU No. 32 tahun 2004 ditegaskan sebagai berikut:

“Undang-undang ini mengakui otonomi yang oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena alasan lain yang warganya pluralis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri”.

Konsep otonomi asli juga dikenal sebagai salah satu asas pengaturan Desa dalam PP No. 72 tahun 2005, turunan dari UU No. 32 tahun 2004, meskipun secara sempit hanya terbatas pada otonomi pemerintahan Desa. Artinya kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat

setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Namun otonomi asli yang terpusat pada susunan asli dan hak asal usul itu di sepanjang sejarah mengalami distorsi yang serius. *Pertama*, negara melakukan intervensi dengan mengubah atau bahkan merapas hak asal usul. Penyeragaman Desa merupakan contoh terkemuka, yang diikuti dengan perampasan tanah-tanah adat. *Kedua*, otonomi asli dipraktikkan secara sempit dengan tindakan mengisolasi Desa, yang menyuruh dan membiarkan Desa mengelola dirinya sendiri dengan swadaya dan gotong royong.

Di sepanjang sejarah intervensi itu yang melemahkan Desa, dan isolasi yang membuat Desa menjadi tertinggal dan tidak mampu. Karena itu di era reformasi wacana dan gerakan otonomi Desa menguat, baik melalui eksperimentasi secara lokal maupun advokasi kebijakan terhadap RUU Desa. Naskah akademik RUU Desa sangat kuat mempromosikan otonomi Desa, meskipun didalamnya tidak mengenal “Desa Otonom”. Ketika pembahasan RUU Desa, pemerintah, DPD dan DPR sepakat untuk menghilangkan konsep otonomi Desa, sebab otonomi Desa sangat politik yang dentik dengan desentralisasi atau daerah otonom tingkat III.

Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang diamanatkan UU Desa, tentu bukan hal baru. Konsep yang nonpolitis ini sudah dikenal sejak 1993, yang kemudian menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di

berbagai tempat. Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang ramai memperbincangkan dan menggerakkan Desa mandiri . tetapi sejauh ini tidak ada makna tunggal tentang Desa mandiri, meskipun Bappenas bersama BPS telah mengukur Desa mandiri dengan berbagai indikator fisik dan sektoral seperti kondisi fasilitas publik Desa.

Kemandirian Desa harus dibedakan dengan kesendirian dan kedirian. Kemandirian Desa bukanlah kesendirian, bukan juga kedirian (*aurchy*). Kedirian berarti ego yang kuat sebagai respons atas intervensi pemerintah dan pihak lain yang menghormati Desa. Desa mengklaim bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, Desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta menganggap warga pendatang disebut sebagai “orang lain” yang berbeda dengan “orang asli”. Sedangkan kesendirian artinya desa mengurus maupun membangun dirinya sendiri dengan sumberdaya yang dimilikinya tanpa dukungan negara tidak hadir mendukung Desa, atau negara melakukan isolasi terhadap Desa.

Kemandirian Desa tentu tidak berdiri sendiri. Tetapi sangat penting untuk melihat relasi antara Desa dengan negara, termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap Desa. Memang ada dilema serius kehadiran (intervensi) negara terhadap Desa. kalau negara tidak hadir salah, tetapi kalau hadir keliru. Konsep kesendirian Desa menunjukkan bahwa negara tidak hadir, dalam hal ini negara melakukan

isolasi terhadap Desa, sehingga wajar kalau ada ribuan Desa berpredikat sebagai Desa tertinggal.

Pada kutub yang lain, kehadiran negara yang berlebihan pada ranah Desa yang bisa disebut sebagai pemaksaan (*imposition*) justru akan melumpuhkan prakarsa lokal dan kemandirian Desa. Arturo Israel (1987), misalnya mengingatkan bahwa intervensi yang terlalu kuat pada dasarnya berkorelasi negatif dengan kinerja sebuah lembaga atau komunitas. Artinya, semakin kuat intervensi maka semakin rendah kinerja lembaga tersebut. Demikian juga, intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada Desa, malah tidak akan menciptakan kemajuan dan kemandirian Desa. Karena itu, Israel menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga sangat diperlukan dukungan politik sepenuhnya oleh pengendali kekuasaan baik di dalam maupun di luar. Bentuk dukungan politik, meminjam Soedjatmoko (1987), bisa dengan pengembangan swaorganisasi (*selforganization*) dan swakelola (*selfmanagement*).

Karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi Desa. emansipasi Desa pada dasarnya berbicara tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominasi. Dengan kalimat lain, emansipasi Desa berarti desa tidak menjadi objek imposisi, dominasi dan penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiritegak sebagai subyek pemberi manfaat. Desa bermanfaat melayani kepentingan masyarakat

setempat dan bergerak membangun ekonomi termasuk dalam kategori emansipasi itu.

Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat Desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya Desa yang membanggakan dan kemampuan Desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, Desa mandiri bertumpu pada trisakti Desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai Desa berdikari. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya sistem partisipatif Desa, serta terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan Desa.

2.1.5 Konsep Desa Membangun Ekonomi

Tema Desa membangun ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan yang digerakkan oleh (*village driven development*), khususnya di sektor ekonomi. Sebagai seorang sarjan ekonomi Totok Daryanto, anggota pansus RUU Desa, sangat getol berbicara tentang desa sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Kepala Desa bersama masyarakat dapat memanfaatkan aset lokal maupun melakukan konsolidasi lahan subsisten menjadi lahan produktif, dengan pola pertanian kolektif, peternakan kolektif atau hutan kolektif. Pembangunan yang digerakkan oleh Desa seharusnya:

1. Pemerintah desa, khususnya kepala Desa mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi gerakan Desa membangun ekonomi.
2. Pemerintah desa bersama masyarakat melakukan aksi kolektif (kebersamaan) membangun ekonomi lokal.
3. Kolektifitas itu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi aset lokal yang tersedia dan tentu layak jual.
4. Pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme, gerakan dan bagi hasil dilakukan melalui musyawarah Desa.

Kedepan, dengan dana Desa yang lebih besar, bisa digunakan sebagai sumberdaya investasi bagi desa untuk membangun ekonomi lokal. Ekonomi lokal berbasis Desa bisa digerakkan oleh para borjuis lokal, dan juga bisa digerakkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sesuai dengan peraturan menteri desa no. 4 tahun 2015 BUMDesa mempunyai sejumlah karakteristik.

1. Pembentukan BUM Desa bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUM Desa.
2. BUM Desa merupakan usaha Desa yang berisikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya dimiliki oleh masyarakat, bukan juga dimiliki oleh individu melainkan menjadi milik pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda dengan

koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUM Desa dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUM Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Mekanisme pembentukan BUM Desa bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUM Desa tidak cukup dibentuk oleh pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah Desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUM Desa, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.
4. Pengelolaan BUM Desa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokratis terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah Desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditujukan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUM Desa dari pemerintah Desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUM Desa.

Ada optimisme tetapi ada juga skeptisisme dalam menyambut kehadiran BUM Desa. pandangan yang skeptis sungguh risau melihat BUM Desa. kerisauan utama yang mengemuka adalah ketidakjelasan status hukum (legal standing) yang jelas, maka usaha Desa ini tidak bisa menjadi subyek yang melakukan perbuatan hukum (misalnya meminjam

uang di bank maupun kerjasama bisnis) untuk mengakumulasi modal. Menurut pandangan ini, jika tidak berstatus hukum, maka BUM Desa selamanya akan kerdil dan hanya bergerak di ranah lokal Desa.

Dalam pembahasan RUU Desa ada harapan besar untuk menjawab kerisauan hukum itu. Ada harapan begitu BUM Desa lahir, ia berbadan hukum seperti koperasi. Namun UU Desa tidak berhasil menjawab harapan ini. UU Desa menegaskan bahwa BUM Desa legal tetapi tidak berbadan hukum, namun ia bisa memiliki unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang jelas, BUM Desa disiapkan menjadi institusi dan gerakan ekonomi berbasis Desa.

Visi UU Desa dapat ditangkap pula dari jalan ideologis pemerintah seperti tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional). 2015- 2019 yang dikenal dengan Trisakti. Tiga butir dalam trisakti adalah :

1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan UU Desa secara konsisten membuka peluang dalam mewujudkan jalan ideologis di atas. Sebagai kesatuan masyarakat hukum terdasar dan terdepan, *men-support* visi UU Desa adalah sama dengan mengembangkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan berkepribadian.

Kemandirian ekonomi Desa merupakan aspek penting dari UU Desa. Melalui UU Desa, kemandirian ekonomi dirintis melalui pengelolaan aset Desa yang dipayungi oleh kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

2.1.6 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Definisi BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa atau yang disingkat BUM Desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan *“goodwill”* dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* menyatakan bahwa:

“BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan

pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.” (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3)

Terdapat 8 (delapan) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
4. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
6. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
7. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*)
8. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

1. pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,

4. menguatkan kelembagaan ekonomi desa,

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam kehidupan berdesa dikenal konsep tradisi berdesa. Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

- BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
- BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

- BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai usaha yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kerja sama antar Desa.
- BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- BUM Desa melakukan tranformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*Goverment driven*; proyek pemerintah) menjadi “Milik Desa”

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87-90.

BAB X Badan usaha Milik Desa

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian,

pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik

Desa pasal 2, 4 dan 5.

BAB II Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

- 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
- 2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Inisiatif pemerintah Desa dan/ masyarakat Desa;
 - b. Potensi Usaha Ekonomi Desa;
 - c. Sumber daya alam di Desa;
 - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5 ayat 1 “pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa,

pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa”.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 3 tahun 2015 tentang Desa pasal 146 ayat 1 “Desa dapat mendirikan BUM Desa”.
4. Peraturan Desa di tiap Desa.

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUM Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUM Desa.

d. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Logika pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat Desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipasi, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base dan self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Sosial (*social institution*) dan Komersial (*commercial institution*).

1. Fungsi social artinya BUM Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social.
2. Fungsi komersial artinya BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (baik barang maupun jasa) ke pasar.

Mekanisme operasionalisasi BUM Desa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa. Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yaitu social dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat Desa.

2.1.7 Konsep Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa [*vide* Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa]. Frasa “*dapat mendirikan BUM Desa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan

pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- (b) potensi usaha ekonomi Desa;
- (c) sumberdaya alam di Desa;
- (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang *Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa*;
- b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang *Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa*;

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang *Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa setempat.

Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan *bidang pelaksanaan pembangunan Desa*.

Aras prosedural dan teknokratik pembentukan BUM Desa memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUM Desa secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

1. sosialisasi tetang BUM Desa.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Dinas terkait), Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan

Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUM Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

3. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDesa

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa. (*Lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes*).

Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang *Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan *bidang pelaksanaan pembangunan Desa*.

Aras prosedural dan teknokratik pembentukan BUM Desa memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUM Desa secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

2.2 Kerangka Konsep

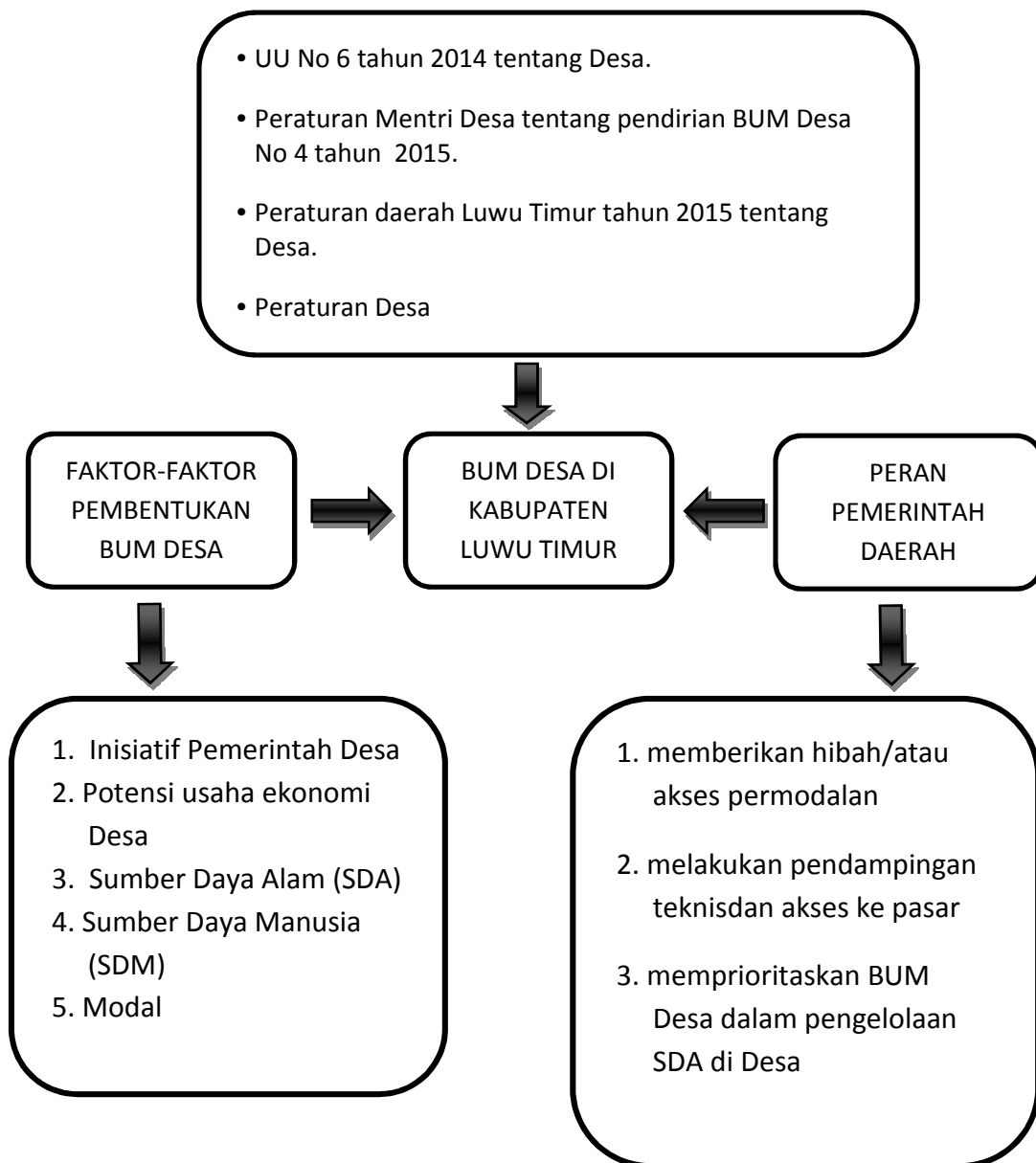
Kebijakan pemerintah mengenai BUM Desa telah mendorong banyak pemerintah daerah untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah menjalankan BUM Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempelajari proses pembentukan dan juga mengenai proses penyusunan. Pemerintah kabupaten Luwu Timur termasuk salah satu yang melaksanakan program pengembangan BUM Desa.

Pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dilakukan oleh pemerintah Daerah, pemerintah Desa bersama masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut.

Tujuan utama dari pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa dalam hal ini yaitu meningkatkan pendapatan asli Desa, meningkatkan potensi Desa dan diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai penyelenggara pemerintahan di salah satu wilayah otonom di Indonesia juga tidak lepas terhadap kewajiban untuk mengawal pelaksanaan BUM Desa, baik Desa yang belum mendirikan maupun yang telah menjalankan, serta mendorong peningkatan kinerja BUM Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Berdasarkan uraian diatas maka berikut adalah bagan kerangka konsep penelitian:

Gambar 2.1 : Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Luwu Timur, yang dimana Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten luwu timur merupakan kabupaten paling timur di provinsi sulawesi selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi tengah disebelah utara dan timur dan provinsi Sulawesi tengara disebelah selatan.

Adapun fokus dari penelitian ini akan di tempatkan di bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan dua Desa yang menjadi sampel penelitian yaitu:

1. Desa Tarengge (Desa yang belum mendirikan BUM Desa).
3. Desa Bangun Jaya (BUM Desa Harapan).

Adapun waktu yang diperkirakan penulis ialah selambat-lambatnya satu bulan agar perolehan data yang didapatkan lebih akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang penulis akan teliti.

3.2 Tipe dan dasar Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada

dilapangan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap cakap dan mampu untuk dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
- d. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur.
2. Tenaga pendamping Profesional (Pendamping Teknis) sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUM Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarengge, sebagai Desa yang belum mendirikan BUM Desa.
4. Kepala Desa Tarengge Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur sebagai Desa yang belum mendirikan BUM Desa.
5. Kepala Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai Desa yang telah mendirikan BUM Desa.

6. Pengurus/Pengelola BUM Desa (Desa Bangun Jaya).

3.5 Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati objek penelitian yang penulis gunakan.

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah ahasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data informasi yang dibutuhkan, yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Selain data primer, juga akan digunakan data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data sekunder lainnya diperoleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.6 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa terkait dan

pengurus BUM Desa yang ada di kabupaten Luwu Timur. Pemilihan objek penelitian ini didasari oleh peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam pelaksanaan pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

3.7 Definisi Operasional

- a. BUM Desa : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu BUM Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur, salah satu diantaranya yaitu BUM Desa “Harapan” yang terletak di Desa Bangun Jaya, yang menjadi BUM Desa percontohan di kabupaten Luwu Timur.
- b. Faktor-faktor yang mendukung Pembentukan BUM Desa : Sebagai implementasi dari aturan perundang-undangan yang berlaku, yang menginginkan pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Adapun yang menjadi pendukung pembentukan BUM Desa yaitu: inisiatif pemerintah Desa, potensi usaha ekonomi Desa, sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, serta penyertaan modal dari pemerintah Desa. Faktor-faktor yang dimaksud lebih mengarah kepada sampel Desa yang belum mendirikan BUM Desa yaitu Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

c. Peran Pemerintah Daerah dalam pembentukan BUM Desa : sebagai langkah yang ditempuh Pemerintah daerah bersama Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembentukan dan mendorong perkembangan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu : memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis atau akses ke pasar serta memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. peran yang dimaksud lebih mengarah ke Desa yang menjadi sampel telah mendirikan BUM Desa yaitu Desa bangun Jaya.

3.8 Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, kajian pustaka dan sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti menggunakan perekam suara seperti handphone, daftar pertanyaan dan lain-lain. Pada saat pengumpulan data, peneliti harus berhati-hati dalam mencatat data, jangan sampai dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan, sehingga Faktor-faktor pembentukan sampai peran pemerintah mengenai BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan secara jelas dan mendetail pada hasil penelitian yang berupa kesimpulan.

3.9 Sajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bab pembahasan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian ini, data kemudian digabungkan menjadi sebuah informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga apa yang terjadi mudah diamati dan akan membantu peneliti dalam menentukan penarikan kesimpulan secara benar. Penyajian data ini berupa analisis peneliti tentang objek yang diteliti.

Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami hal yang terjadi dalam proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur sesuai amanah undang-undang terkait.

3.10 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai implementasi pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian beserta hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Kabupaten Luwu Timur yang meliputi sejarah, luas dan batas wilayah administrasi, demografi, jumlah penduduk serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang merupakan perangkat daerah yang membidangi Desa termasuk pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu bab ini menguraikan gambaran umum BUM Desa, peluang pembentukan BUM Desa serta bagaimana usaha pemerintah daerah dalam pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

4.1 Profil Daerah Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Luwu Timur

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutan di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.

Dalam perjalanan panjang pembentukan kabupaten ini, terangkai suka dan duka bagi para penggagas dan penginisiatif yang akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Semuanya telah

menjadi hikmah yang dapat dipetik pelajaran dan manfaat tak ternilai guna kepentingan membangun daerah ini di masa depan. Secara kronologis, sekilas perjalanan panjang itu, dapat dilukiskan sebagai berikut:

1) Kisaran Tahun 1959

Pada Bulan Januari Tahun 1959, situasi ketentraman dan keamanan pada hampir seluruh kawasan ini, sangat mencekam dan memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak yang membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota Malili. Peristiwa ini, secara langsung melahirkan semangat heroisme yang membara, khususnya di kalangan para pemuda pada` waktu itu, untuk berjuang keras dengan tujuan membangun kembali wilayah eks Kewedanaan Malili yang porak poranda. Gagasan pembentukan kabupaten pun merebak dan diperjuangkan secara bersungguh-sungguh. Sebagai dasar utamanya, secara sangat jelas termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan, termasuk di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada realitas, ternyata terdapat 3 Daerah Ex Onder Afdeling yakni Malili, Masamba dan Mamasa belum dapat diwujudkan pembentukannya, terutama disebabkan karena alasan situasi keamanan yang belum memungkinkan pada waktu itu.

2) Kisaran Tahun 1963

Harapan kembali berkembang, ketika dikeluarkan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD –GR) Daerah tingkat II Luwu di Palopo, Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tanggal 2 Mei 1963, yang menyetujui Ex Onder Afdeling Malili menjadi Kabupaten. Kemudian, sebagai perkembangannya, dikeluarkanlah Resolusi Nomor 9/Res/DPRD-GR/1963 yang memutuskan untuk meninjau kembali Resolusi Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tersebut, sehingga terdapat konsiderans yang berbunyi sebagai berikut: “mendesak Pemerintah Pusat RI Cq. Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah agar membagi Dati II Luwu menjadi 4 Dati II yang baru terdiri dari Dati II Palopo, Dati II Tanah Manai, Dati II Masamba dan Dati II Malili”.

3) Kisaran tahun 1966

Berdasarkan laporan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada sidang seksi Pemerintahan V tanggal 2 Mei 1966, dihasilkan kesimpulan sepakat untuk menyetujui tuntutan masyarakat Ex Kewedanaan Malili menjadi Daerah Tingkat II dengan nama Kabupaten Malili dengan Ibukota di Malili. dilanjutkan pada Paripurna VI DPRD Propinsi Sul-Sel tanggal 9 Mei 1966 disetujui Ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten. Lahirnya keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan mahasiswa yang berasal dari wilayah Eks Kewedanaan Malili, dimana secara bersama-sama kalangan muda tersebut dengan penuh semangat mendesak DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk merekomendasikan pembentukan Kabupaten di Wilayah Eks Kewedanaan Malili. Keputusan

itu disikapi oleh kalangan mahasiswa dengan semangat heroik dengan melakukan long-march dari Makassar menuju ke wilayah Eks Kewedanaan Malili guna mensosialisaikan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi mereka, baik karena minimnya fasilitas maupun tantangan kurangnya jaminan keamanan pada masa itu.

Hal tersebut, tidak sedikitpun melemahkan semangat para Mahasiswa untuk menguinjungi wilayah Eks Kewedanaan Malili, mulai dari Wotu, Mangkutana, Malili, Tabarano dan Timampu serta kembali ke Makassar. Beberapa bulan kemudian dilakukan pertemuan antara perwakilan penuntut dan penggagas Kabupaten yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Eks Kewedanaan Malili (IKMAL) dengan Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1966, Gubernur Sul-Sel pada waktu itu Achmad Lamo menyatakan: “Sebenarnya Malili menjadi Kabupaten tinggal menunggu waktu saja “. Pada tanggal 8 Oktober 1966 Panitia Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Malili dan Masamba menghadap Sekjen Depdagri pada waktu itu (Soemarmman, SH). Pada pertemuan itu, Sekjen berjanji akan mengirimkan Tim ke Daerah yang bersangkutan.

4) Kisaran tahun 1999

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan ruang kebebasan lebih luas terhadap `wacana pemekaran Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan sebagai

momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat Ex Kewedanaan Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten. Pada awal tahun 1999, saat pemekaran Kabupaten Luwu sedang dalam proses, timbul kembali aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan dan mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembentukan suatu Kabupaten pada wilayah Eks Kewedanaan Malili sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi-Selatan.

Menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu yang beragam, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan DPRD Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan pada pasal 2 sebagai berikut ; Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk selain menyetujui Pemekaran Daerah TK. II Luwu menjadi 2 (Dua) kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, agar melanjutkan Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II dengan menjadikan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Masamba dan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Malili masing-masing menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II serta peningkatan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Madya Daerah TK. II.

Meskipun aspirasi dan tuntutan masyarakat Luwu Timur untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur yang otonom sesuai dengan hak historis dan kecukupan potensi yang dimiliki belum terealisasi, namun tidak mengurangi semangat dan tekad masyarakat Luwu Timur untuk

berjuang mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Pertemuan Akbar masyarakat Ex Kewedanaan Malili pada tanggal 18 Maret 2000 di Gedung pertemuan Masyarakat Malili yang menghasilkan rekomendasi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ex Kewedanaan Malili yang hasilnya telah diusulkan melalui surat Nomor 005/PP-Alu/2000 tanggal 20 April 2000 Tentang Usul Pemekaran Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luwu Timur maka lahirlah keputusan DPRD Luwu Utara mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pansus dan SK Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2 (dua) wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara. Hal ini, kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap Pembentukan ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tertanggal 04 April 2002, Nomor 100/134/Bina PB.Bang Wil .

5) Kisaran Tahun 2002-2003

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan Penjabat Bupati Luwu Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan

bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone - Bone, Kabupaten Luwu Utara. Pada hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertempat di lapangan Andi Nyiwi, Malili.

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administratif Kabupaten Luwu Timur berdiri sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

B. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

kabupaten luwu timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di provinsi di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah disebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara disebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di ketinggian 0-1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Gambar 4.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur



Kabupaten luwu timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 kelurahan. Adapun 11 kecamatan yaitu, Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana Dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah kabupaten Luwu Timur. Kota Malili merupakan ibukota kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar).

Tabel 4.1
Luas Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Burau	18	-	256,23	3,69
2	Wotu	16	-	130,52	1,88
3	Tomoni	12	1	230,09	3,31
4	Tomoni Timur	8	-	43,91	0,63
5	Angkona	10	-	147,24	2,12
6	Malili	14	1	921,20	13,26
7	Towuti	18	-	1.820,48	26,21
8	Nuha	4	1	808,27	11,64
9	Wasuponda	6	-	1.244,00	17,91
10	Mangkutana	11	-	1.300,96	18,73
11	Kalaena	7	-	41,98	0,60
Jumlah		124	3	6.944,88	100

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur 2015

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² – kedalaman 95 m), Danau matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2

(dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa (luasnya 171,5 Ha).

C. Demografi

jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data tahun 2014 mencapai jumlah 277.488 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 68.872 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 (empat) jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan malili sebesar 40.188 jiwa kemudian Kecamatan Burau dengan 34.841 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak 32.810 jiwa.

Pada tahun 2014 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 40 jiwa per/km². Kecamatan yang paling padat adalah kecamatan Tomoni timur dengan kepadatan 296 jiwa per/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah kecamatan wasuponda dan mangkutana masing-masing sebesar 17 jiwa per/km².

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2011-2014

No	Usia	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 14	48.980	46.010	94.990
2	15 – 64	88.467	83.537	172.004
3	65+	5.232	5.262	10.494
Jumlah		142.679	134.809	277.488

sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2015

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Burau	31.726	34.630	34.050	34.346	34.841
2	Wotu	29.153	29.153	29.658	29.952	30.396
3	Tomoni	22.972	23.418	23.363	23.453	23.825
4	Tomoni Timur	12.439	12.522	12.599	12.678	12.979
5	Angkona	24.344	24.792	24.812	24.792	25.921
6	Malili	33.386	36.625	37.656	39.566	40.188
7	Towuti	28.349	29.536	31.425	33.427	32.810
8	Nuha	25.532	23.052	23.429	23.323	23.436
9	Wasuponda	18.860	19.848	20.281	20.604	20.722
10	Mangkutana	20.601	21.288	21.059	21.650	21.578
11	Kalaena	11.211	11.163	11.108	11.379	11.413
	Total	267.863	266.532	269.734	275.523	277.488
Pertumbuhan Penduduk			-0,5%	1,19%	2,10%	0,71%

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur 2015

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 105,84 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu timur terdapat sekitar 106 laki-laki.

4.1.2 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai konsekuensi dari terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya dalam bidang pemberdayaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan adalah bidang Pemberdayaan, sebagai tindak lanjut kewenangan tersebut dibentuklah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur No 36 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

a. Tugas dan fungsi Organisasi

Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Struktur / Kondisi organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:
 - a. Sub bagian perencanaan.
 - b. Sub bagian keuangan.
 - c. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang pemerintahan Desa/kelurahan, membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:
 - a. Sub bidang bina pemerintahan desa/kelurahan.
 - b. Sub bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan.

4. Bidang kelembagaan, partisipasi masyarakat dan usaha ekonomi membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu:
 - a. Sub bidang pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipatif.
 - b. Sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
5. Bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu:
 - a. Sub bidang pemberdayaan sumber daya alam perdesaan/kelurahan
 - b. Sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan/kelurahan.

Jumlah pegawai yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 10 orang tenaga upah jasa posisi tahun 2016, dengan uraian menurut fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala badan : 1 orang
2. Sekretaris badan : 1 orang
3. Kepala bidang : 3 orang
4. Sub bagian : 3 orang
5. Sub bidang : 6 orang
6. Staf : 9 orang
7. Upah jasa staf : 9 orang
8. Sopir : 2 orang

9. Cleaning service : 1 Orang

10. Penjaga kantor : 1 orang

4.1.3 Profil Desa Tarengge

1. Kondisi Desa

Desa Tarengge merupakan salah satu Desa dari 16 (Enam belas) Desa di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Desa Tarengge terdiri atas 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Madani, Dusun Lawani, Dusun Tarengge, Dusun segitiga Emas, Desa Tarengge adalah Desa Agraris dan menjadi pusat pertemuan antara 5 Propinsi di Sulawesi Selatan sehingga Desa Tarengge di beri Gelar sebagai Segitiga Emas. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini.

2. Sejarah Desa

Pada tahun 1967 Bersamaan keluarnya aturan pemerintah Pusat menghendaki adanya keseragaman Admintrasi Pemerintahan pada saat itu juga terbentuk Desa Tarengge pecahan dari Desa Lampanai Kec. wotu dan yang pertama di tunjuk oleh Camat sebagai pejabat adalah Zainuddin Dg Matteredu sampai Tahun 1982. Tahun 1982 – 1991 Zainuddin Dg Matteredu Digantikan oleh Muh. Idris Nompo mantan Danramil Wotu sampai Tahun 1991. Dan pada Tahun 1986 tarengge di mekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Maramba dan Sebagai Kepala Desa Maramba pertama adalah Sakarani pada Tahun 1986. Kemudia pada tahun 1990

Desa Tarengge di mekarkan lagi yaitu Desa kalaena dan kepala desa Kalaena pertama adalah Kasim Maduppa.

Tahun 1991-1993 Terjadi transisi Pemerintahan Desa tarengge di jabat oleh Jabir Isto sampai akhir tahun 1993. Dan pada Tahun 1993 dimekarkan lagi yaitu Desa Karambua dan sebagai Kepala Desa Karambua pertama yaitu Muchtar Nasir pada tahun 1993. Tahun 1993-1999 Pada akhir tahun 1993 resmi dipilih dan diangkat oleh Hasanuddin . BA samapai Tahun 1999. Tahun 1999-2000 Terjadi transisi pemerintahan dan pada waktu itu di jabat sementara oleh Drs. Sapei' Basir Tahun 1999 s/d 2000. Tahun 2000-2008 Diadakan pemilihan yang terpilih dan di angkat sebagai Kades adalah Patawari.M sampai tahun 2008 sebagai periode I. tanggal 24 November 2008 kembali di adakan pemilihan Kepala Desa Tarengge dan terpilih adalah Patawari.M dan di Lantik pada tanggal 5 Januari 2009 oleh Bupati Luwu Timur di Aula kantor Bupati Luwu Timur sebagai periode II dan berakhir 5 Januari 2015. Pada tanggal 6 Januari 2015 terjadi kembali transisi Pemerintah Desa Tarengge di jabat Oleh Jamaluddin samapai tanggal 15 November 2015 dan Resmi di pilih dan di angkat Anwar sebagai Kades Tarengge yang baru dan dilantik pada Tanggal 16 November 2016 Sampai sekarang.

3. Geografis & Demografi

a. Geografis

Desa Tarengge terletak 45 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Timur, atau 4 Km dari Ibukota Kecamatan Wotu, dengan luas wilayah 9,14 Km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tadulako.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lampenai.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarengge Timur.
- e) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cendana Hijau.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan

TDK TAMAT SD	SD	SMP	SLTA	SARJANA
727	364	310	202	66

c. Mata Pencaharian

Tabel 4.5 : Mata Pencaharian

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH	HONORE R
3	90	13	64	24

4. Potensi

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Tarengge yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :

a. Sumberdaya Manusia

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Tarengge dalam meraih visi cerdas.

4.1.4 Profil Desa Bangun Jaya

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana

Sebelah Selatan : Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni

Sebelah Timur : Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur

Sebelah Barat : Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni

2. Luas wilayah menurut penggunaan

Luas tanah sawah : 187.19 Ha

Luas tanah kering : 77.45 Ha

Luas tanah basah : 0.00 Ha

Luas tanah perkebunan : 142.00 Ha

Luas fasilitas umum : 9.49 Ha

B. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 1429 Orang

Perempuan : 1182 Orang

Jumlah total : 2431 Orang

Jumlah Kepadatan Keluarga : 703 KK

2. Kewarganegaraan

Tabel 4.6

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	1249 orang	1182 orang
Warga Negara Asing	0 orang	0 orang
Jumlah	1.249 orang	1.182 orang

3. Agama/aliran kepercayaan

Tabel 4.7

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1239 orang	1169 orang
Kristen	6 orang	9 orang
Katholik	0 orang	0 orang
Hindu	4 orang	4 orang
Jumlah	1.249 orang	1.182 Orang

C. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 4.8

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	391 orang	74 orang
Buruh Tani	15 orang	13 orang
Pegawai Negeri Sipil	19 orang	17 orang
Pengrajin	13 orang	0 orang
Pedagang barang kelontong	4 orang	0 orang
Peternak	1 orang	0 orang
Perawat swasta	0 orang	2 orang
POLRI	1 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	3 orang	2 orang
Guru swasta	5 orang	4 orang
Dosen swasta	1 orang	0 orang
Pedagang Keliling	12 orang	6 orang
Tukang Kayu	5 orang	0 orang
Tukang Batu	5 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	1 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	18 orang	3 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	2 orang	0 orang
Wiraswasta	146 orang	15 orang
Konsultan Manajemen dan Teknis	1 orang	0 orang
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	34 orang	20 orang
Belum Bekerja	231 orang	203 orang
Pelajar	210 orang	185 orang
Ibu Rumah Tangga	7 orang	476 orang
Purnawirawan/Pensiunan	5 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	2.151 orang	

4.2 Gambaran Umum BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur

1. BUM Desa yang Terdaftar

Salah satu solusi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan adalah melalui Program pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hal tersebut yang melatar belakangi pemerintah kabupaten luwu timur dalam mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa. Namun, dalam perjalanannya banyak hambatan dan tantangan yang ditemui oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam merealisasikan kebijakan nasional tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa mengungkapkan bahwa:

“Tahun 2017 adalah tahun bumdes. Dimana di tahun 2017 tiap desa diwajibkan untuk membentuk bumdes sehingga di tahun 2018 semua bumdes telah berjalan dan beroperasi sesuai dengan unit usaha yang telah dirancang” (wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah sangat mengharapkan tiap Desa untuk segera membentuk dan mendirikan BUM Desa. Dengan adanya batasan waktu yang ditentukan diharapkan pemerintah Desa mampu memanfaatkan tahun 2017 untuk menggali potensi yang dimiliki Desa agar lebih siap dan memiliki konsep yang matang untuk mewujudkan BUM Desa yang mampu mensejahterakan masyarakat Desa. Dalam proses pelaksanaan pembentukan dan pendirian BUM Desa peran pemerintah daerah dan

pemerintah desa harus saling bersinergi agar tujuan BUM Desa dapat terealisasi. Dilain sisi pembentukan BUM Desa di kabupaten Luwu Timur sudah memiliki payung hukum yang jelas baik itu Peraturan daerah maupun peraturan di tiap Desa.

Berikut adalah BUM Desa yang telah terdaftar di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD):

Tabel 4.9
Jumlah BUM Desa yang terdaftar

No	Kecamatan/Desa		Nama BUMDesa	Tahun Berdiri	No. Dan Tgl Perdes	Unit Usaha	Nomor dan Tgl SK Pengurus BUMDesa
1	2		3	4	5	9	11
I	KECAMATAN TOMONI						
	1	Bangun Jaya	Harapan	2016	No. 05 Tahun 2015	1. Simpan pinjam 2. Foto copy & ATK	Nomor 33/DB/IX/2016, Tanggal 21 sep 2016
	2	Mandiri	Mitra Mandiri	2016	No. 07 Tahun 2016	1. Cetak batako 2. Pengelasan 3. Perkebunan 4. Jahit atap 5. Tagihan listrik	Nomor 37 Tahun 2016, Tanggal 09 Nov 2016
II	KECAMATAN MALILI						
	3	Laskap	Maju Bersama	2016	No. 03 Tahun	1. Jahit Menjahit/Bordi	3-Kep/Ds.Laskap/2016,07

					2016	r	Nov 2016
	4	Manurung	Manurung Mandiri	2016	No. 03 Tahun 2014	1. Simpan pinjam 2. Penjualan 9 bahan pokok 3. Perkebunan dan pertanian	Nomor 05 Tahun 2015, tanggal 06 april 2015
	5	Balantang	Karya Sipatuo	2016	No. 21 Tahun 2016	1. Usaha penjualan 9 bahan pokok 2. Usaha sewa menyewa	Nomor 21 Tahun 2016, tanggal 26 Nov 2016
III	KECAMATAN BURAU						
	6	Bonepute	Sehati	2016	No. 06 Tahun 2016	1. Sewa menyewa 2. Pencucian kendaraan bermotor 3. Industri kecil dan kerajinan rakyat	Nomor 46 tahun 2016, Tanggal 21 Nov 2016
	7	Burau Pantai	Burau Pantai	2016	No. 06 Tahun 2016	1. Usaha Air Galon	Nomor 39 tahun 2016, tanggal 09 Nov 2016
	8	Lagego	Lagego Mariolo	2017	No. 02 Tahun 2017	1. Usaha sewa menyewa 2. Jual beli sawit	Nomor 20 Tahun 2017, Tanggal 06 Februari 2017
IV	KECAMATAN WASUPONDA						

	9	Kawata	Lawora Jaya	2016	No. 06 Tahun 2016	1. Pasar Desa 2. Usaha pertanian dan perkebunan 3. Usaha simpan pinjam	Nomor 16 Tahun 2016, tanggal 15 Nov 2016
V	KECAMATAN TOMONI TIMUR						
	10	Kertoharjo	Kartadana	2016	No. 04 Tahun 2016	1. Usaha pertanian dan perkebunan 2. Usaha simpan pinjam 3. Usaha perdagangan dan jasa	Nomor 35 tahun 2016, Tanggal 22 okt 2016
VI	KECAMATAN TOWUTI						
	11	Wawondula	Karya sejahtera mandiri	2016	No. 11 tahun 2016	1. Usaha pengelolaan pasar 2. Usaha pengelolaan sampah 3. Usaha pengelolaan BLM PUAP 4. Usaha jasa konstruksi 5. Usaha jasa pertanian	Nomor 30 Tahun 2016, tanggal 30 Nov 2016

	12	Baruga	Pioneer	2016	No. 01 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpan pinjam 2. Usaha pengelolaan sampah 3. Usaha pengelolaan BLM PUAP 4. Usaha jasa konstruksi 5. Usaha jasa pertanian 	Nomor 09 Tahun 2017, Tanggal 01 Maret 2017
	13	Loeha	Loeha Jaya	2017	No. 03 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha pertanian dan perkebunan 2. Usaha sewa menyewa 3. Usaha pinjam pinjam 	Nomor 14 Tahun 2017, Tanggal 03 maret 2017
	14	Bantilang	Harapan Jaya	2016	No. 29 tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha pertanian dan perkebunan 2. Usaha sewa menyewa 3. Usaha simpan pinjam 	Nomor 27/DBT/SK-BUMDES/VII /Tahun 2016, tanggal 07
	15	Tokalimbo	Bintang Pesisir		No 12 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan kompos 2. Perben gkelan 3. Simpan pinjam 	Nomor 12 tahun 2016
VII	KECAMATAN TOMONI						

	16	Balai Kembang	Kembang Abadi	2016	No 06 tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha pencucian mobil 2. Usaha pertanian 3. Usaha persewaan tenda pesta 	Nomor 40 Tahun 2016, tanggal 21 Desember
	17	Kasintuwu	Sintuwu Raya	2017	No 03 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpan pinjam 2. Usaha industri rumah tangga 3. Usaha sewa menyewa 	Nomor 75 Tahun 2017 Tanggal 24 februari
	18	Maleku	Sehati	2017	No 03 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpan pinjam 2. Perdagangan dan lumbung pangan 3. Sarana produksi pertanian 	Nomr 06 Tahun 2017, tanggal 06 Maret 2017
	19	Sindu Agung	Amanah	2016	No 09 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli hasil bumi 2. Jual oleh-oleh khas sindu agung 3. Jual pupuk organik 	Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 05 Januari 2017

VIII	KECAMATAN KALENA						
	20	Sumber Agung	Abdi Masyarakat	2016	No 05 Tahun 2016	1. Simpan pinjam 2. Perece takan 3. Usaha jasa hiburan 4. Usaha pertanian dan perkeu nan	Nomr 37 Tahun 2016, Tanggal 04 November 2016
	21	Argomulyo	Karya Mulya	2016	No 03 Tahun 2016	1. Simpan pinjam 2. Usaha pertanian dan perkebunan	Nomor 36 Tahun 2016, tanggal 07 November 2016

Sumber: Sub bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan data diatas dapat tergambarkan bahwa dari 124 jumlah Desa dan 11 kecamatan di kabupaten luwu timur, yang terdaftar membentuk BUM Desa sebanyak 21 desa dari delapan kecamatan. Jadi, ada 103 Desa yang belum membentuk dan mendaftarkan BUM Desanya di DPMD. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas, ada beberapa hambatan yang ditemui pemerintah desa dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa di tiap-tiap Desa di kabupaten Luwu Timur.

2. BUM Desa yang Berjalan

Wacana kelahiran BUM Desa terus mendorong Desa-Desa se-kabupaten luwu timur bangkit dan merubah nasibnya. Dengan bekal aset dan potensi mereka membentuk dan mendirikan lalu menciptakan rupa-rupa kreatifitas dan langkah berani yang patut diberi apresiasi dalam

usaha membangun kesejahteraan bagi warga. Sejak tahun 2015 ada beberapa Desa yang mulai mengambil langkah untuk membentuk lembaga usaha BUM Desa.

“Sejak dilakukannya sosialisasi di tahun 2015 ada beberapa desa yang mencoba untuk mengambil langkah untuk segera membentuk BUM Desa. Termasuk dua Desa yang telah menjadi *pilot project* yaitu Desa Bangun Jaya kec. Tomoni dan Desa Laskap kec. Malili. Dan sampai saat ini ada lima Desa yang mampu menjalankan BUM Desanya berjalan dan beroperasi walaupun dalam perjalanannya mereka masih jatuh bangun. Tapi merupakan awal yang baik untuk memberikan contoh bagi Desa-Desa yang belum mendirikan BUM Desa”. (wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas dalam rentan waktu dua tahun Kabupaten Luwu Timur berhasil membentuk dan mendirikan BUM Desa. Dari pencapaian tersebut masih dianggap kurang dalam pelaksanaannya karena pemerintah daerah mewajibkan setiap Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa. Sebanyak 119 Desa yang belum mendirikan BUM Desa sampai tahun 2017. Jumlahnya masih sangat banyak dari jumlah Desa keseluruhan, dalam perjalanannya Desa masih memiliki banyak hambatan dan tantangan dalam merealisasikan pelaksanaan pembentukan dan pendirian BUM Desa.

Tabel 4.10

Jumlah BUM Desa yang berjalan sampai Tahun 2017

No	Kecamatan & Desa	Nama BUM Desa	Tahun Berdiri	Nomor dan tanggal Perdes	Unit Usaha	Nomor dan Tgl SK Pengurus BUMDesa
1	Desa laskap Kec. Malili	Maju Bersama	2016	No. 03 Tahun 2016	Jahit Menjahit/Bordir	3-Kep/Ds.Laskap/2016,07 Nov 2016
2	Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni	Harapan	2016	No. 05 Tahun 2015	3. Simpan pinjam 4. Foto copy & ATK	Nomor 33/DB/IX/2016, Tanggal 21 sep 2016
3	Desa Kawata Kec. Wasuponda	Lawora Jaya	2016	No. 06 Tahun 2016	4. Pasar Desa 5. Usaha pertanian dan perkebunan 6. Usaha simpan pinjam	Nomor 16 Tahun 2016, tanggal 15 Nov 2016
4	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	Karya Mulya	2016	No 03 Tahun 2016	3. Simpan pinjam 4. Usaha pertanian dan perkebunan	Nomor 36 Tahun 2016, tanggal 07 November 2016
5	Desa Tokalimbo Kec. Towuti	Bintang Pesisir	2016	No 12 Tahun 2016	4. Pembuatan kompos 5. Perbengkelan 6. Simpan pinjam	Nomor 12 tahun 2016

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari data diatas ada dua Desa yang terbilang sukses dalam menjalankan BUM Desa yaitu Desa Bangun Jaya kec. Tomoni dan Desa Laskap Kec. Malili.

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Luwu Timur

Pemerintah pusat memberikan peluang kepada kabupaten/kota di seluruh Tanah Air untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mendongkrak pendapatan asli desa yang ada di daerah setempat.

Sebagai lembaga bisnis sosial dan jika berorientasi pada keuntungan, BUM Desa harus kokoh dan mampu membaca peluang ditengah tengah masyarakat sebagai upaya menciptakan BUM Desa yang terus hidup dengan ditopang oleh sumber daya yang memadai. Pembentukan BUM Desa memberikan peluang Desa untuk memberdayakan masyarakatnya dengan mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh setiap Desa. Potensi- potensi Desa yang menjadi pertimbangan dalam Pembentukan BUM Desa adalah Sebagai berikut :

a. Inisiatif Pemerintah Desa

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah

tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Inti dari otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari tingkatan pemerintahan. Mengingat adanya otonomi yang telah diberikan kepada Desa, maka pemberian kewenangan Pemerintah Desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah Desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagai daerah yang otonom, Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai

ekonomi. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

Pada dasarnya, kekayaan milik Desa merupakan aset Desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat Desa sekarang hingga mendatang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa. Pengelolaan kekayaan desa ini merupakan amanah yang diberikan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa. Dimana untuk melakukan pengelolaan kekayaan milik desa, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu perangkat desa. Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Namun, Kepala Desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa yang merupakan kekuasaannya dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan uraian diatas peran pemerintah Desa sangat kuat dalam pembentukan dan pendirian BUM Desa, mulai dari proses perencanaan sampai proses evaluasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa mengetahui secara detail kondisi Desa. Dalam penelitian ini ada dua Desa yang menjadi fokus peneitian yaitu Desa yang telah mendirikan BUM Desa dan Desa yang baru merintis pembentukan BUM Desa. Terkait inisiatif Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembentukan BUM Desa berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Desa tarengge:

“Dari pemerintah daerah kami telah diarahkan untuk membentuk BUM Desa di tahun ini, di Desa tarengge sendiri belum terlaksana karena habis libur lebaran, tapi insyaallah bulan ini akan diadakan musyawarah Desa untuk membentuk BUM Desa. adapun langkah-langkah yang akan kami tempuh yaitu musyawarah bersama BPD, tokoh masyarakat lalu pemberian nama BUM Desa dan terakhir pembentukan badan pengurus BUM Desa”. (wawancara bersama Kepala Desa Tarengge Bapak Anwar, S.Pd, di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Desa Tarengge sebagai pengambil keputusan tertinggi akan segera mendirikan BUM Desa di tahun ini. Hal itu karena himbauan dari Pemerintah Daerah dan memang Desa Tarengge memiliki potensi untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah lembaga ekonomi untuk mengelola aset Desa.

Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, sebagai Desa yang lebih dulu merintis BUM Desa dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. BUM Desa “Harapan” yang diresmikan pada 27 September 2016 merupakan

Desa yang inovatif serta patut diberi apresiasi karena usaha yang dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa dan sebagai Desa percontohan. Hal ini dikarenakan inisiatif dari pemerintah Desa bersama masyarakat untuk merealisasikan BUM Desa.

Tenaga Ahli mengungkapkan salah satu hambatan yang ditemui dalam proses pembentukan BUM Desa adalah kemauan dari Kepala Desa. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya regulasi yang tidak mendukung serta dampak BUM Desa yang tidak terlalu signifikan. Namun, hal itu bukan penghambat untuk Pemerintah daerah terkhusus Tenaga Ahli di Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk BUM Desa, masalah tersebut mampu diatasi oleh pendamping Desa yang tersebar di seluruh kecamatan bersama Tenaga Ahli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meyakinkan Pemerintah Desa bahwa BUM Desa memiliki manfaat sebagaimana fungsinya yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi.

BUMDes dapat didirikan oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes sudah sepatutnya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes sebaiknya dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam pendirian BUMDes, maka akan tumbuh rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes sehingga masyarakat akan berperan serta terhadap perkembangan dan pengelolaan BUMDes kedepannya.

b. Potensi Ekonomi Desa

Potensi Desa adalah segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan perkembangan Desa. Dalam hal ini potensi ekonomi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki Desa untuk kemudian mempunyai nilai jual atau bernilai ekonomi.

Ada 3 (tiga) sektor dalam potensi ekonomi Desa yaitu:

1. Sektor primer, meliputi pekebunan, pertanian, dan perikanan.
2. Sektor sekunder, meliputi pengolahan dan industri.
3. Sektor tersier, meliputi perdagangan jasa, pelayanan dll.

Dua Desa yang menjadi fokus penelitian merupakan desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai wilayah yang cukup strategis untuk memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada.

a. Desa Tarengge

Dari 142 Desa yang ada di kabupaten Luwu Timur, Desa Tarengge merupakan salah satu Desa yang belum membentuk atau mendirikan BUM Desa. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang kurang mendukung proses pelaksanaan terbentuknya BUM Desa tersebut.

Berdasarkan analisis Kepala Desa Tarengge ada beberapa hal yang menjadi peluang dan hambatan dalam mendorong pembentukan BUM Desa.

“salah satu aset yang berpeluang untuk pembentukan BUM Desa yang dimiliki oleh Desa tarengge adalah sungai yang bisa dikelola menjadi objek wisata Desa, namun dalam proses realisasi masih banyak masyarakat yang acuh dan belum paham tentang manfaat BUM Desa. hal ini di karenakan SDM yang belum memadai dan kurangnya kreatifitas masyarakat”. (wawancara bersama Kepala Desa Tarengge Bapak Anwar, S.Pd, di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Desa Tarengge memiliki sumber daya alam yang cukup memadai untuk mendorong pembentukan BUM Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa wajib memanfaatkan aset Desa dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendayagunakan atau mengembangkan aset tersebut. Dari pembahasan tersebut seharusnya hubungan pemerintah Desa dan masyarakat harus diperkuat dengan cara berpartisipasi aktif dalam hal pengembangan ekonomi Desa terkhusus untuk pembentukan BUM Desa.

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis. ada bebarapa potensi yang harus digali lagi, contohnya mengembangkan home industri. Di desa

terengge ada beberapa *home industri* yang cukup terkenal yaitu pengolahan kripik pisang tanduk. Ada beberapa masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan dan memasarkannya sendiri, jika hal ini dapat dimanfaatkan dan menerima bantuan oleh pemerintah Desa akan sangat lebih berkembang dan mampu mensejahterakan masyarakat Desa serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.

“Desa tarengge memiliki aset yaitu tanah milik Desa yang bisa dikelola oleh lembaga BUM Desa, karena kondisi lahan tersebut sekarang menjadi lahan kosong dan tidak terurus. Sebaiknya lahan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan lebih baik lagi jika difungsikan untuk pengelolaan BUM Desa” (Wawancara Bersama anggota BPD Desa tarengge, tanggal 18 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Desa Tarengge memiliki aset berupa tanah milik Desa, yang jika di fungsikan akan bernilai ekonomi.

b. Desa Bangun Jaya

Kabupaten Luwu Timur dalam slogannya yaitu “menuju Luwu Timur terkemuka Tahun 2021” juga ingin mensejahterakan masyarakatnya di tingkat Desa dengan cara meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia maka dipandang perlu untuk dibentuk dan didirikan BUM Desa. saat ini ada 5 (lima) BUM Desa yang sedang berjalan dan beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Salah satu Desa yang menjadi *pilot project* atau percontohan adalah BUM Desa Harapan yang terletak di Desa Bangun Jaya kec. Tomoni.

BUM Desa Harapan yang diresmikan pada 27 September 2016 merupakan Desa yang inovatif serta patut diberi apresiasi karena usaha yang dilakukan sampai akhirnya dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa dan sebagai Desa percontohan (*pilot project*). Berikut adalah unit usaha yang dikelola BUM Desa “Harapan”:

1. ATK
2. Foto copy
3. Pembayaran listrik Prabayar dan pasca bayar.
4. Pulsa HP
5. Cetak undangan
6. Press laminating
7. Campuran.

Berdasarkan analisis kepala Desa ada beberapa potensi yang yang menjadi keinginannya, diantaranya yaitu:

- 1) Raskin yang dikelola oleh BUM Desa.
- 2) BPJS yang dikelola sendiri oleh BUM Desa.
- 3) Penyewaan tenda acara.
- 4) Penyewaan mesin pencacah untuk kegiatan pertanian.

“kami ingin mengembangkan beberapa unit usaha tambahan, tetapi dalam prosesnya kami terhambat di modal. Contohnya penyewaan tenda acara, yang jika dihitung-hitung memiliki banyak keuntungan jika di realisasikan ”. (wawancara dengan Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli 2017).

itu adalah beberapa poin yang menurut kepala Desa Bangun Jaya merupakan potensi untuk kemudian dikembangkan melalui lembaga BUM Desa.

Dari penjelasan kedua Desa tersebut, Desa Tarengge memiliki hambatan di pembentukan BUM Desa terkait kurangnya pengetahuan masyarakat ataupun Pemerintah Desa terkait potensi atau aset Desa yang bisa dikelola oleh BUM Desa, selain itu sumberdaya manusia yang belum memumpuni untuk mengelola aset yang ada, serta tidak ada adanya langkah nyata Pemerintah Desa ataupun Masyarakat untuk memulai.

Lain halnya dengan Desa Bangun Jaya, Desa ini selangkah lebih maju dari Desa Tarengge. Dalam mendorong perkembangan BUM Desa “Harapan” Pemerintah Desa sudah memiliki beberapa keinginan untuk mengembangkan usaha yang ada dan memanfaatkan sumber pendapatan yang lainnya, namun dalam proses pelaksanaannya ada kendala yang ditemui yaitu modal usaha yang tidak mencukupi.

c. Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan materi-materi dan potensi alam yang terdapat di planet bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat berupa benda hidup (unsur-unsur hayati), yaitu hewan dan tumbuhan. Terdapat pula benda mati (nonhayati), seperti tanah, udara, air, bahan galian atau barang tambang. Selain itu terdapat pula kekuatan-kekuatan

alam menghasilkan tenaga atau energi. Misalnya, panas bumi (geothermal), energi matahari, kekuatan air, dan tenaga angin. Segala sesuatu yang berada di alam (di luar manusia) yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercipta kesejahteraan hidup manusia tersebut dinamakan sumber daya alam (*natural resources*). Dalam pengertian lain sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di lingkungan sekitar manusia yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan, merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Berikut adalah gambaran mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur dan juga sebagai penunjang terbentuknya BUM Desa dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.

1. Potensi Sektor Pertanian

Potensi sektor pertanian sangat ditunjang oleh kemampuan lahan sebagai media tumbuh bagi tanaman pertanian dan perkebunan termasuk pakan ternak untuk usaha peternakan. Lahan sawah di kabupaten Luwu Timur seluas 24.074 hektar, terdapat 22.110 hektar yang menggunakan irigasi, 1.699 hektar merupakan sawah tadah hujan dan pasang surut 265 hektar. Lahan kering di Kabupaten Luwu timur diantaranya digunakan untuk berbagai keperluan. Sebanyak 25.404 hektar digunakan sebagai tegal/kebun, 11.934 hektar untuk ladang/huma, 33.487 hektar untuk perkebunan, 2.871 hektar untuk hutan rakyat, 9.092 hektar untuk tanah gembala/padang rumput.

Rata-rata produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di kabupaten Luwu timur pada tahun 2013 sebesar 68,39 kuintal/hektar dengan luas panen sebesar 38.571 hektar dan produksi 263.818,98 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah kecamatan wotu dengan total produksi 50.352,10 ton dari luas panen sebesar 5.761 hektar.

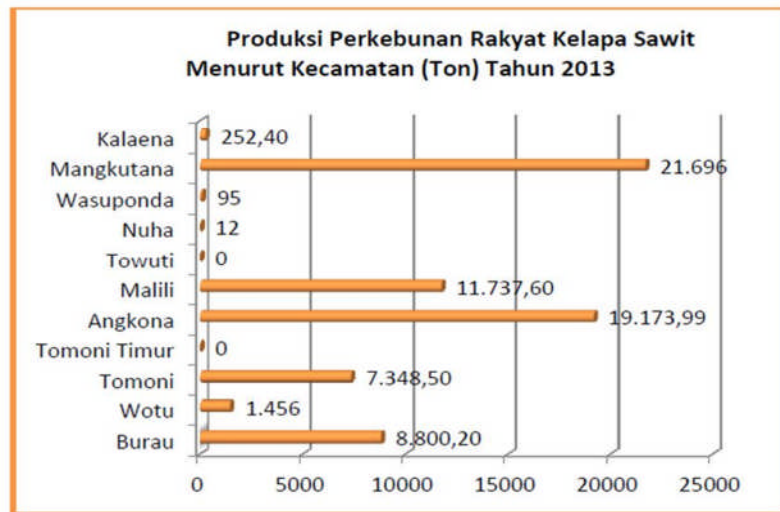
Gambar 4.2. Grafik Produksi padi menurut Kecamatan di Kab. Luwu Timur tahun 2013 (Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, 2014)



Sub sektor hortikultura mencakup tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman biofarma dan tanaman hias. Komoditi yang disajikan pada tanaman sayuran meliputi sawi, kacang panjang, cabe, cabe rawit, tomat, terong, kangkung dan bayam. Pada tahun 2013 produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah tanaman kacang panjang dengan produksi 98 ton.

Sedangkan tanaman buah-buahan yang dihasilkan meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas, rambutan dan duku. Tanaman obat-obatan meliputi jahe, laos, kencur, kunyit dan temulawak dengan produksi terbesar adalah jahe sebanyak 2.382 kg.

Gambar 4.3. Produksi perkebunan rakyat kelapa sawit menurut kecamatan (ton) tahun 2013 (Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka, 2014)



2. Potensi Kehutanan

Sebagian besar Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hutan. Berdasarkan data dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat luas hutan lindung adalah 238.589,52 ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 179.552,45 ha, hutan produksi terbatas sebesar 96.554,38 ha, hutan produksi tetap sebesar 9.135,32 ha dan hutan produksi yang dapat di konversi sebesar 17.759,63 ha. Sedangkan untuk produksi kayu hutan, ada tiga jenis produksi kayu hutan di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya dalam bentuk kayu bulat sebesar 12.614,38 m³, kayu gergajian sebesar 10.386,98 m³ dan kayu lapis sebesar 12.839,71 m³.

3. Potensi Peternakan

Pada tahun 2013 di Kabupaten Luwu Timur tercatat populasi ternak sapi potong sebanyak 13.298 ekor, kerbau sebanyak 1.022 ekor, kambing sebanyak 7.594 ekor dan babi sebanyak 15.028 ekor. Selain itu pada periode yang sama tercatat ayam kampung sebanyak 177.777 ekor, ayam pedaging sebanyak 169.835 ekor dan ayam petelur sebanyak 81.337 ekor. Pada tahun 2013 kegiatan pemotongan ternak tercatat sebanyak 1.394 ekor sapi, 404 kambing, 630 ekor babi, 9.773 ayam buras, 37.846 ekor ayam pedaging dan 254 ayam petelur.

4. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Luwu Timur cukup besar karena Luwu Timur terletak di pesisir teluk Bone sehingga tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten ini relatif cukup besar. Pada tahun 2013, produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 42.497,11 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebanyak 8.840,11 ton dan perikanan budidaya sebanyak 33.657 ton.

Kecamatan Malili, Angkona, Bura dan Wotu merupakan produsen utama perikanan laut di Kabupaten Luwu Timur. produksi ikan laut di Kabupaten Luwu Timur diantaranya tongkol, tuna, tenggiri, layang, kerapu dan teri. Produksi ikan laut yang paling banyak adalah ikan layang yakni sebanyak 1.250,4 ton sedangkan produksi perikanan budidaya yang terbesar adalah rumput laut *Gracillaria SP* yaitu 119.706 ton. Produksi

rumput laut *Gracillaria* SP ini masih dalam keadaan produksi basah. Apabila di konversi ke dalam produksi kering sebesar 11.970,6 ton.

Dari pembahasan mengenai sumber daya alam diatas terlihat bahwa kabupaten luwu timur memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari potensi pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan merupakan potensi yang mampu dikelola untuk kemudian bernilai ekonomis serta mampu mendorong tiap Desa untuk memanfaatkan SDA yang dimiliki.

Sumber data yang penulis dapatkan diatas yaitu bersumber dari Laporan Pendahuluan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Luwu Timur Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian kepala Dinas mengungkapkan belum ada analisis secara ilmiah yang dilakukan DPMD terkait potensi tiap Desa Yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

“Usaha yang dilakukan dinas untuk menganalisis secara ilmiah potensi alam tiap desa belum ada. Tapi seharusnya ada tindakan dari dinas terkait analisis tersebut. Karena kami menganggap itu penting. Hal ini dilatar belakangi karena belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan riset terkait potensi yang dimiliki Desa ”. (wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa secara ilmiah Dinas terkait belum melakukan riset secara mendalam terhadap potensi yang dimiliki tiap Desa untuk menjadi pertimbangan usaha ekonomi dalam menunjang pembentukan BUM Desa dan dalam pernyataannya penelitian atau analisis secara ilmiah penting dilakukan untuk mengawal dan

menginisiasi Desa untuk membentuk dan mendirikan BUM Desa dengan memanfaatkan aset Desa berupa sumber daya alam yang ada.

d. Sumber Daya Manusia yang Mampu Mengelola BUM Desa

Salah satu aspek yang tak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUM Desa adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUM Desa sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di Desa. sayangnya SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUM Desa di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Pengelolaan SDM menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUM desa. manajemen SDM dapat dimulai dari perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen (penarikan karyawan), seleksi, orientasi, sampai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi yang mengelola sumberdaya alam (SDA).

Potensi SDM melalui BUM Desa, partisipasi masyarakat menjadi modal sosial yang mampu memperkuat potensi-potensi desa. BUM Desa dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya kelompok-kelompok minat dalam masyarakat (kelompok pertanian, kelompok lingkungan hidup, kelompok ekonomi produktif).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut. Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management yang matang. Padahal, BUMDes sudah menjadi program nasional Pemerintah Pusat.

Dalam sistem pembangunan Desa, ada beberapa strategi pengembangan ketahanan masyarakat Desa. Strategi tersebut adalah dengan memahami dan menggerakkan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kualitas sumber daya manusia dalam proses pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Pendekatan terhadap masyarakat Desa, mengenali lapis-lapis sosial ekonomi dan sosial politik setempat, dan mendekati kelompok-kelompok strategis atau dominan di Desa tersebut.
- 2) Pendamping tinggal di lokasi dampingan selama beberapa waktu untuk hingga pemahaman yang utuh tentang kompleksitas kondisi dan masalah di desa serta kelompok yang didampingi.

- 3) Penumbuhan kader lokal, yaitu unsur warga pada lokasi program yang akan melanjutkan peran, fungsi dan tugas-tugas pendamping dimasa yang akan datang.
- 4) Pengembangan kelembagaan komunitas yaitu upaya mengembangkan suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan serta arpirasi warga kelompok-kelompok yang telah didampingi dan merupakan benuk pengembangan lebih lanjut pengorganisasian kelompok.
- 5) Menjaga kerjasama lintas pelaku dengan pemerintah.

Keseluruhan, strategi pengembangan ketahanan ini membutuhkan langkah-langkah kongkrit dan programik agar dapat sinambung dengan agenda pemberdayaan secara umum. Langkah kongkrit dan program tersebut di desain untuk meningkatkan daya kritis masyarakat Desa baik dalam memandang kehidupannya sendiri maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman secara efektif dan mendalam serta mampu menumbuhkan kualitas sumber daya manusia untuk kemudian mampu mengelola umber daya yang ada di Desa terkhusus untuk keberlangsungan BUM Desa.

sebagai Desa yang telah mendirikan dan mengelola BUM Desa, Desa Bangun Jaya memiliki 6 (enam) pengelola yang tercantum dalam pelaksana operasioanal BUM Desa “Harapan”.

“Pengangkatan pengurus berdasarkan orang-orang yang di anggap cakap dan memiliki keahlian dalam mengelola unit usaha yang ada” (wawancara bersama Manager BUM Desa “Harapan” Tanggal 17 Juli 2017).

Dalam pengangkatan pengelola BUM Desa di Desa Bangun Jaya tidak terlalu mengalami kesulitan hal ini dikarenakan animo atau perhatian masyarakat terhadap lembaga ekonomi tersebut sangat menarik untuk dikembangkan selain itu dengan adanya BUM Desa tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa.

Lain halnya dengan Desa Tarengge, berdasarkan pengakuan kepala Desa “masyarakat masih kurang dalam memahami BUM Desa. sehingga saya masih kesulitan dalam merekrut pengurus yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam mengelola BUM Desa nantinya”. (wawancara bersama Kepala Desa Tarengge di Kantor Desa tarengge, Tanggal 17 Juli 2017).

Dalam sebuah organisasi kapabilitas sumber daya manusia sangat diperhitungkan karena hal ini yang akan menjadi tolak ukur eksistensi dari sebuah organisasi. Seperti halnya BUM Desa sebagai lembaga yang bergerak di bidang kewirausahaan sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk mengelola BUM Desa.

e. Modal

Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Untuk mengembangkan

usaha BUM Desa, Desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal kepada BUM Desa yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Modal BUM Desa terdiri atas Penyertaan Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas:

- Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan, Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Untuk

mengembangkan Usaha BUM Desa, Desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal kepada BUM Desa yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya.

“Dari penyertaan modal kami pemerintah Desa sangat bergantung dari persetujuan Pemerintah Daerah untuk mencairkan dana untuk dialokasikan untuk modal pembentukan dan pendirian BUM Desa. Desa kami lumayan banyak potensi dan kreativitas masyarakat untuk membuat usaha baru contohnya untuk penyewaan tenda pengantin atau acara-acara lainnya. Berdasarkan hitung-hitungan keuntungan lumayan banyak omzet yang akan di dapatkan. Kami telah mengusulkan ke pemerintah daerah untuk segera diberikan modal. Tapi masih sulit untuk mencairkan dana tersebut” (wawancara dengan Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli 2017).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa Desa masih bergantung pada Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal untuk merealisasikan pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dalam hal ini Desa masih berharap pada Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

“Penyertaan modal akan dilaksanakan di Tahun 2018, dengan cara mengikuti langkah-langkah yang telah disepakati yaitu pembentukan pengurus Bum Desa, pemberian nama BUM Desa dan ada AD/ART BUM Desa ”.

Adapun alur penyertaan modal sebagai berikut:

“Ada di RKPDes baru masuk dalam APBDes kemudian penyerahan dana melalui berita acara, daftar hadir, kwitansi lalu di transfer ke rekening bumdes. Sebelumnya bumdes harus buka rekening yang di tanda tangani oleh ketua dan bendahara”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, SP di sekretariat P3MD tanggal 18 Oktober 2017).

BUM Desa “Harapan” merupakan BUM Desa yang telah menerima penyertaan modal yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bangun Jaya Nomor 23 tahun 2016 tentang bantuan penyertaan modal pemerintah Desa kepada BUM Desa “Harapan”, memberikan bantuan dana penyertaan modal kepada pengurus BUM Desa sebagai pengelola unit-unit usaha sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).

Dari pembahasan mengenai faktor-faktor pendukung pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam merealisasikan pembentukan lembaga ekonomi BUM Desa.

“Kalau dari pemerintah daerah terkhusus dinas tidak memiliki hambatan dalam mendorong desa dalam pembentukan bumdes. Tapi kendala yang justru dari desa itu sendiri karena desa belum memahami bumdes secara mendalam.”(Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Halsen, S.IP, MM. 06 Juli 2017 di kantor Dinas PMD)

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait tidak menemukan masalah yang signifikan terkait proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Dinas menganggap hal yang justru mempunyai masalah adalah di tingkat Desa itu sendiri. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Tarengge sebagai desa yang belum membentuk BUM Desa.

“Ada beberapa masalah di Desa terkait proses pembentukan BUM Desa di Desa Tarengge, diantaranya yaitu karakter masyarakat yang acuh terhadap program-program pemerintah, kurangnya kreatifitas masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terkait BUM Desa dan belum adanya sosialisasi dari dinas terkait untuk memberikan pemahaman ke Desa tentang pentingnya BUM Desa. Dari dinas hanya sekedar menghimbau

Desa untuk membentuk BUM Desa.” (wawancara dengan Kepala Desa Tarengge, Bapak Anwar, S.Pd. 17 Juli 2017 di kantor Desa Tarengge).

Dari pernyataan Kepala Desa diatas ada beberapa masalah yang dijumpai Desa dalam proses pembentukan BUM Desa hal tersebut sejalan dengan pernyataan kepala Dinas. Namun dalam penyampaian kepala desa, Dinas terkait belum melakukan melaksanakan tugasnya yaitu untuk memberikan pemahaman dan pendampingan ke tiap-tiap Desa untuk mendalami BUM Desa. Hanya perintah/himbauan pembentukan BUM Desa saja yang telah dilakukan. Pemberian pemahaman tersebut sangat dibutuhkan Desa untuk menggali lebih dalam lagi mengenai manfaat BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain masalah yang diatas Tenaga Ahli mengungkapkan ada tiga alasan kenapa ada Desa yang belum dan tidak mau mendirikan BUM Desa yaitu:

1. Regulasi yang tidak mendukung.
2. Sumber daya manusia yang tidak memadai.
3. Kemauan dari kepala Desa.

Berikut adalah kutipan wawancaranya:

“Kendala yang kami temui ada banyak. *Yang pertama*, mengenai Perbup yang mendukung, tentang pembiayaan. Penyertaan bumdes masuk di pembiayaan. Jika masuk dipembiayaan berarti dikurangi 30 % dari 70% masuk di SILTAP (penghasilan tetap) jika itu dimasukkan otomatis gaji dari kepala desa dan jajarannya berkurang. Contohnya 100 juta berarti ada pengurangan 100 ribu per perangkat tiap bulan artinya regulasi yang tidak mendukung. Tapi di kabupaten lain dia tetap masuk di pemberdayaan artinya tidak mempengaruhi 30 % itu. Perbup untuk

bumdes belum ada tapi perbup untuk penyusunan anggaran apbdes yang ada. *Kedua*, Faktor sdm untuk menjadi pengurus. *Ketiga*, Kemauan dari kepala Desa karena BUM Desa adalah lembaga bisnis jadi tidak ada keuntungan untuk kepala Desa.” (Wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, SP. Di sekretariat P3MD, Tanggal 18 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut ada beberapa hambatan yang menjadi tolak ukur dari Tenaga Ahli dalam proses pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur.

4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Luwu Timur

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai kewenangan melaksanakan tugas terkait urusan otonomi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan kepegawaian perlengkapan dan peralatan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan Desa dan Kelurahan.
- c) Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan.
- d) Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat Desa.
- e) Sasaran 5 : Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

Penjabaran diatas merupakan poin-poin sasaran yang ingin dicapai DPMD tahun 2016-2017. Dari 5 (lima) poin sasaran yang ada sasaran nomor 5 (lima) adalah penjabaran yang berkaitan dengan BUM Desa sebagai lembaga sosial ekonomi. Adapun perkembangan mengenai penguatan lembaga sosial ekonomi di Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Indikator Kinerja DPMD Terkait Lembaga Ekonomi Desa

Indikator Kinerja	2015	2016		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase lembaga ekonomi yang dibentuk dan difasilitasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 klp	10 %	9 %	90 %

Penjelasan:

Pada tahun 2016, realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100%, pada kegiatan ini difokuskan untuk pembentukan 11 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan 11 Desa sebagai pilot project. 11 BUM Desa ini mendapatkan pendampingan dalam focus grup discusion potensi Desa, dan bimbingan dalam pembuatan AD/ART.

- Hambatan/kendala: tidak semua Desa mempunyai keinginan membentuk BUM Desa karena mereka lebih kearah pembangunan dalam pembiayaan dana Desa mereka.
- Solusi/pemecahan masalah: untuk tahun ini masih tetap dilakukan pilot project untuk pembentukan BUM Desa dengan memfasilitasi Desa tersebut untuk membentuk BUM Desa.

Data diatas adalah data yang penulis rangkum dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2016. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan ada 3 (tiga) usaha yang telah pemerintah

daerah dalam hal ini DPMD telah lakukan, sehingga persentase target, realisasi dan capaian dapat terlihat pada tabel tersebut.

“Usaha yang telah kami tempuh untuk merealisasikan terbentuk dan berdirinya BUM Desa yaitu sosialisasi secara bertahap, rapat koordinasi dengan kepala desa se-kabupaten Luwu Timur dan menyurati tiap Desa untuk segera membentuk BUM Desa. Dari proses sosialisasi Tahun 2015 sudah ada lima Desa yang telah mendirikan BUM Desa dan masih berjalan sampai sekarang.” (wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Tenaga Ahli Kabupaten Luwu Timur mengungkapkan bahwa:

“Sampai sekarang bumdes yang terbentuk baru 24 kami selalu mensosialisasikan bagaimana tahun 2017 sudah mempersiapkan pembentukan bumdes dalam artian sudah ada Perdes, sudah ada pengurus, ada ad/art. Terus kita harapkan juga tahun ini sudah ada pelatihan pengurus bumdes kemudian tahun berikutnya penyertaan modal ke tiap-tiap bumdes.” (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, Sp. Di sekretariat P3MD Luwu Timur. Tanggal 18 Oktober 2017).

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini pemerintah daerah hanya sekedar menghimbau Desa untuk membentuk Desa sebagaimana alur yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Permendesa No 4 Tahun 2015.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDesa. Yang bersumber dari Laporan Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Luwu Timur 100% penggunaan Aplikasi SISKEUDES.
2. Kabupaten Luwu Timur baru ada 5 desa yang melaporkan pembentukan BUMDesa.

3. Total asset Kabupaten Luwu Timur sudah berkembang.
4. Omset BUMDesa Kabupaten Luwu Timur masih rendah.
5. Untuk PAD Kabupaten Luwu Timur masih minim.
6. Kabupaten Luwu Timur ada 3 Kecamatan dan 6 Desa yang belum melaporkan Penggunaan Dana Desa.

4.4.1 Memberikan Hibah/atau Akses Permodalan

Berndasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 sumber permodalan BUM Desa yaitu:

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas
 - a. Penyertaan modal Desa.
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa yang dimaksud adalah:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai

kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

- d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

“Alur penyertaan modal yaitu, ada di RKPDes baru masuk dalam APBDes kemudian penyerahan dana melalui berita acara, daftar hadir, kwitansi lalu di transfer ke rekening bumdes. Sebelumnya bumdes harus buka rekening yang di tanda tangani oleh ketua dan bendahara”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, Sp. Di sekretariat P3MD Luwu Timur. Tanggal 18 Oktober 2017).

Penyertaan modal yang telah dcairkan oleh pemerintah daerah untuk 5 (lima) Desa yang telah membentuk dan mengoperasikan BUM Desanya. Seperti di Desa Bangun Jaya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pengurus BUM Desa “Harapan” sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bangun Jaya No 23 tahun 2016 tentang bantuan penyertaan modal pemerintah Desa kepada BUM Desa “Harapan”.

Untuk Desa-desa yang dalam tahap perencanaan dan pembentukan penyertaan modal selanjutnya di tahun 2018.

Berikut adalah gambaran Bum Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran (Buku Kas BUM Desa) yang menggambarkan perputaran modal serta keuntungan yang didapatkan dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan dari bulan Desember 2016 sampai Juni 2017.

Tabel 4.12
Buku Kas Umum BM Desa Harapan

No	Bulan/Tahun	Uraian	Saldo
1	Desember 2016	Saldo tunai pada bulan ini	Rp.21.644.574
		Pendapatan /jasa pada bulan ini	-
2	Januari 2017	Saldo tunai pada bulan ini	Rp.13.131.686
		Pendapatan /jasa pada bulan ini	Rp.2.195.789
3	Februari 2017	Saldo tunai pada bulan ini	Rp.5.500.281
		Pendapatan /jasa pada bulan ini	Rp.1.159.893
4	Maret 2017	Saldo tunai pada bulan ini	Rp.3.084.301
		Pendapatan /jasa pada bulan ini	Rp.1.646.100
5	April 2017	Saldo tunai pada bulan ini	Rp. 5.797.701
		Pendapatan /jasa pada bulan ini	Rp. 1.076.464

Sumber: Buku kas Bumdes “harapan” Desa Bangun Jaya

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pendapatan tiap bulan BUM Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya masih terlihat belum signifikan dikarenakan pendapatan yang belum meningkat bahkan mengalami penurunan.

4.4.2 Melakukan Pendampingan Teknis dan Akses ke Pasar

1. Sosialisasi

Sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang dikatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik, apabila ia bukan hanya menampilkan kebutuhannya sendiri saja, tetapi juga memerhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain.

Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.

Usaha yang ditempuh pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam mendorong pembentukan BUM Desa secara efektif dan efisien serta sebagai sarana penyebarluasan terkait BUM Desa adalah dengan melakukan sosialisasi, adapun tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman mendalam ke tiap-tiap Desa. selain itu diharapkan aparatur Desa atau pihak yang mengikuti sosialisasi mampu mengimplementasikan pemahaman yang didapatkan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi Desanya masing-masing.

“Sosialisasi yang telah dilakukan tahun 2015 berhasil membentuk 5 bumdes yang telah berjalan sampai saat ini dan 16 desa yang masih dalam tahap perancangan.” wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).

Hal serupa juga disampaikan oleh tenaga ahli bidang TTAG.

“Sampai saat ini sudah 10 kecamatan yang telah melakukan sosialisasi dan untuk tingkat Desa sudah sering dilakukan oleh Pendamping Desa”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Bapak Subhan, SP di sekretariat P3MD tanggal 18 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara tersebut Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta Tenaga Ahli telah melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa.

Untuk Desa Tarengge dan Bangun Jaya berdasarkan hasil wawancara sama-sama mengakui masih kurangnya sosialisasi yang telah

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Belum ada bentuk pendampingan dari pemerintah daerah termasuk sosialisasi terkait BUM Desa, kami belajar secara otodidak dengan mencari dan menggali informasi dari internet.” (wawancara bersama Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya. Tanggal 17 Juli 2017).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh kepala Desa Tarengge sebagai Desa yang masih merintis dari nol BUM Desanya.

“Kami masih membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah maupun pendamping Desa untuk merealisasikan pembentukan BUM Desa, mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa terkait pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.”(wawancara bersama Kepala Desa Tarengge, Bapak Anwar, S.Pd. Di Kantor Desa Tarengge Tanggal 17 Juli 2017).

Kemampuan Desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya Desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat miskin Desa. BUM Desa tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja, BUM Desa adalah usaha yang bersifat kolektif karena BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial.

2. Rapat Koordinasi

Selain sebagai fungsi fasilitator, pemerintah daerah dan desa juga menjadi pemberi informasi kepada pengurus BUMDes untuk menyampaikan kabar berita mengenai perkembangan aturan ataupun berita dari pusat yang diharapkan sesegera mungkin bisa diimplementasikan di dalam BUMDes. Informasi yang diberikan kepada pihak desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pelaksana

BUMDes khususnya dan masyarakat desa pada khususnya untuk mendorong kreatifitas mereka menuju kesejahteraan masyarakat yang mereka harapkan.

Fungsi lain yang tidak kalah penting dari pemerintah dalam hal pengelolaan BUMDes adalah fungsi pemerintah desa dan/atau kabupaten sebagai badan yang memonitoring dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART. Dalam fungsi monitoring dan evaluasi ini juga, pemerintah bersama-sama dengan dewan komisaris, dewan penasihat (Kepala Desa), dan masyarakat sama-sama ikut mengawasi berjalannya pengelolaan BUMDes untuk kemudian bersama-sama juga memberikan laporan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat lewat pengesahan laporan pertanggungjawaban BUMDes di akhir periode atau setiap akhir tahun.

Rapat yang dilakukan bersama kepala Desa bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi Desa yang tidak membentuk BUM Desa.

“salah satu kendala yang muncul yaitu adanya kepala Desa yang tidak ingin membentuk BUM Desa, hal ini dilatar belakangi karena BUM Desa adalah lembaga bisnis. Sehingga tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh kepala Desa.” (wawancara bersama Tenaga Ahli Kabupaten Luwu Timur)

Hal itulah yang melatar belakangi perlu diadakannya rapat koordinasi bersama tiap kepala Desa. Yang diharapkan dalam rapat tersebut yaitu kepala Desa menyampaikan kendala-kendala yang muncul di internal maupun eksternal Desanya terkait pembentukan BUM Desa.

Dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pendamping Desa menghasilkan 3 (tiga) poin yang akan direalisasikan yaitu:

1. Akan ada bantuan dari provinsi yaitu berupa bantuan permodalan sebesar 50 juta rupiah.
2. Banyak kegiatan yang nantinya akan berurusan dengan BUM Desa.
3. Tahun ini semua Desa harus sudah membentuk BUM Desa di masing-masing Desanya.

Berdasarkan 3 (tiga) poin tersebut merupakan batu loncatan untuk Desa agar segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tahun 2018.

3. Secara Administratif

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melalui jalur administratif yaitu menyurati tiap Desa untuk segera membentuk BUM Desa.

4.4.3 Memprioritaskan BUM Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas berdirinya BUMDes.

Karakteristik lokal yang dimaksud yaitu dalam perencanaan unit usaha sebaiknya lebih dahulu menganalisis mengenai hal yang disediakan oleh alam atau sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi dan mendukung untuk dikembangkan melalui BUM Desa.

“Potensi yang dimiliki daerah ada banyak ada di bidang pertanian, jasa, pariwisata. Tapi yang ada saat ini dibidang jasa, konveksi, pencucian mobil. Tapi yang paling banyak di bidang pertanian sebagai sumberdaya pendukung bumdes”. (wawancara bersama Tenaga Ahli Kabupaten Luwu Timur).

Di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data mengenai jumlah rancangan unit usaha yang dikembangkan ada sekitar 20 unit usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dari 62 unit usaha yang ada, dan ada sekitar 5 (lima) Desa yang tidak bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dari uraian mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan BUM Desa masalah yang paling signifikan yaitu tidak adanya Tenaga Ahli yang mebidangi BUM Desa.

“Sebenarnya tenaga ahli di bidang bumdes belum ada. Ada 6 TA (tenaga ahli PMD, tenaga ahli pembangunan, tenaga ahli TTAG) mau tidak mau yang ada itu yang mengambil tupoksi mengenai BUM Desa, di tingkat kecamatan juga masih kurang pendamping Desa dimana seharusnya tiap Desa memiliki satu pendamping lokal Desa”.

Dari pernyataan tersebut Tenaga Ahli dan pendamping lokal Desa sebagai fasilitator pembentukan BUM Desa harus berbagi tugas untuk menyukseskan BUM Desa di tiap Desa. sebagaimana langkah kerja Pendamping Desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa yaitu, fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa, fasilitasi promosi dan sosialisasi manfaat pendirian BUM Desa, fasilitasi pendirian BUM Desa, fasilitasi pengembangan kapasitas pengelola BUM Desa, fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa, fasilitasi pengembangan modal usaha BUM Desa dan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha BUM Desa.

Dari pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi dan peran pemerintah Daerah dalam mendorong pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur, secara garis besar perbedaan Desa yang memiliki BUM Desa dengan Desa yang belum memiliki BUM Desa belum terlihat secara signifikan. Hal ini berdasarkan tiga responden yang memiliki pendapat yang sama yaitu Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli TTAG dan Kepala Desa Bangun Jaya.

“Perbedaan desa yang memiliki dengan desa yang belum memiliki BUM Desa belum terlihat perbedaannya untuk pemasukan PADes-pun belum ada”(wawancara bersama Kepala Dinas PMD Bapak Halsen, S.IP, MM, di kantor DPMD. Tanggal 06 Juli 2017).

“Perbandingannya belum terlihat secara signifikan untuk pengimplementasian tujuan dan manfaat juga belum terlihat, sampai saat ini BUM Desa belum memiliki pemasukan untuk PADes kami masih fokus di kesejahteraan pengelola dari 6 orang pengelola 3 orang telah diberikan upah yang sesuai dan selebihnya kami masih berusaha untuk memberikan upah yang sama”(wawancara dengan Kepala Desa Bangun Jaya, Bapak Sunarsono. Di kantor Desa Bangun Jaya, Tanggal 17 Juli 2017).

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan tujuan dan manfaat dari BUM Desa belum terealisasi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitiandan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehinggabermanfaat pada penulisan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur meliputi inisiatif pemerintah Desa, potensi ekonomi Desa, sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan modal. Hal in berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam analisis tersebut ada beberapa faktor yang masih dianggap kurang dalam pembentukan BUM Desa di Kabupaten Luwu Timur yaitu, masih kurangnya analisis potensi ekonomi Desa, analisis sumber daya alam yang tidak tersentuh, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong terbentuknya BUM Desa dengan berdasar pada

Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: Memberikan hibah dan/atau akses permodalan, Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. memberikan hibah/akses permodalan dilakukan dengan memberikan modal kepada 5 (lima) Desa yang telah mendirikan BUM Desa serta mendorong Desa untuk segera membentuk BUM Desa untuk segera mendirikan BUM Desa agar di tahun 2018 tiap Desa mendapatkan penyertaan modal. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan secara administratif atau menyurati tiap Desa untuk segera membentuk BUM Desa. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui memberikan pemahaman kepada setiap Desa bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan kebutuhan pokok dalam pemebntukanBUM Desa.

5.2 Saran

1. Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa bersama masyarakat agar dapat bekerjasama dalam menganalisis potensi yang dimiliki untuk mendorong pembentukan BUM Desa terutama

analisis mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia agar BUM Desa dapat berjalan secara optimal.

2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi BUM Desa yang telah dilakukan. Salah satu yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha melalui BUM Desa kepada masyarakat, memberikan pelatihan secara kreatif dan inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan memanfaatkan potensi kearifan lokal. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus (Peraturan Bupati) terkait BUM Desa sehingga pelaksanaan BUM Desa dapat berjalan secara optimal. Serta menambah tenaga ahli dalam hal ini tenaga ahli yang membidangi BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Hasrat, dkk. 2014 *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin

Dewi YSR, Meirinawati. 2013. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desamelalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).

Hayyuna R, Pratiwi RN, Mindarti LI. 2014. *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomer 1.

Haryanto, Eko Sri. 2015. *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Haryanto, Eko Sri. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kementrian Desa. 2015. *Buku Saku Desa (Kewenangan Desa dan Regulasi Desa)*. Jakarta

Malo, Manasse, dkk. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Universitas indonesia

Maschab, mashuri. 2013. *Politik pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : Fisipol UGM

Sayuti Mahmud. 2010. *Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala*. Palu : Universitas Tadulako

- Suharto, Didik.G. 2010. *Membangun Kemandirian Desa*.Pustaka Pelajar
- Sukasmanto. 2014. *Rancang bangun Bisnis dan pengelolaan BUM Desa*.
Yogyakarta : Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa
(FPPD)
- Sukriono, Didik dan M.Syaiful Aris. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Jawa Timur : Intrans Institute
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih
- Suyanto, Bagong. 2002. *Menakar Prospek Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum-Des)*. Jawa Timur : Universitas Airlangga
- Tama DOE dan Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta [Id].
Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widjaja, Haw. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta.

B. Peraturan

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang

pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 3 tahun 2015 tentang Desa.

C. Data Online

<https://pelatihanbumdesatangguh.blogspot.co.id/2017/07/pelatihan-bumdes-di-luwu-timur-wa.html> (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2017)

<http://aminjaya.desa.id/berita/detail/buku--panduan---pendirian-dan-pengelolaan--badan-usaha-milik-desa--bumdes> (Diakses pada tanggal 1 September 2017)


http://www.luwutimurkab.go.id/lutim/index.php?option=com_content&view=article&id=2796:desa-bangun-jaya-dan-kelurahan-malili-sebagai-pilot-poject-bumdes&catid=1:berita-terbaru (Diakses pada tanggal 2 September 2017)

<http://bpmsulsel.com/bumdes/web/bumdeskabkota/73.20.00.00/kabupaten-luwu-timur.html> (Diakses pada tanggal 05 September 2017)

<http://infolutim.com/pelantikan-perangkat-desa-bangun-jaya-sekaligus-persmian-bumdes-lembaga-peduli-umat/> (Diakses pada tanggal 07 September 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 7 4 6 9

Nomor : 7330/S.01P/P2T/05/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Luwu Timur

di-
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 5108/UN4.8.1/PL.02/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : SITI MARYAM BAHRI
Nomor Pokok : E121 13 025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Juni s/d 29 Juli 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Mei 2017


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 29-05-2017


Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor: 0827/UN4.8.1/PL.02/2017

12 Oktober 2017

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara**

Yth. Pendamping Desa di Kabupaten Luwu Timur

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

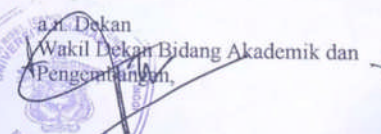
Nama : Sitti Maryam Bahri
Nomor Pokok : E121 13 025
Departemen : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sahabat I Makassar
Nomor Hp. : 082348476768

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI
KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan

Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP. M.Si.
NIP. 19730813199802 2001

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
4. Pertiagal.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Sam Ratulangi Telp. (0474) 321279

Email : kesbangluwutimur@gmail.com

MALILI, 92981

Malili, 13 Juni 2017

K e p a d a

Nomor : 070 /152/KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. 1.Kepala DPMD
2. Camat Wotu
3. Camat Tomoni
Di -

Tempat

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor : 7330/S.01P/P2T/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **SITTI MARYAM BAHRI**
No.Pokok : E121 13 025
Tempat/Tanggal Lahir : Tarengge, 10 November 1996
Program Studi : S1. Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswi FISIP UNHAS Makassar
Alamat : Dsn.Segitiga Emas, Desa.Tarengge, Kec.Wotu
Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Instansi Bapak / Ibu dalam rangka pelaksanaan Penyusunan skripsi dengan judul :

"ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Juni s/d 13 Agustus 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menye tujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



KEPALA KANTOR,

Drs. H. HASANUDDIN BENGNGARENG, M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19591231 198602 1 062

Tembusan . Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kadis Pendidikan Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Sdr.(i) **Sitti Maryam Bahri** di Tempat.

Lampiran 2. Peraturan Perundang-undangan

**MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- meninggal dunia;
 - telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - mengundurkan diri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- Ketua;
 - Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh

Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Fajar Tri Suprpto

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 296

Lampiran 3. Landasan BUM Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
DESA BANGUN JAYA

PERATURAN DESA BANGUN JAYA
NOMOR : 05/DB/V/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna mendukung menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta kearifan lokal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan: (3/2015).

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA
dan
KEPALA DESA BANGUN JAYA

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BANGUN JAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Desa adalah Desa Bangun Jaya.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bangun Jaya.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bangun Jaya.
6. Perangkat Desa adalah pelaksana pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
8. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, simpan pinjam, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
9. BUM Desa adalah badan usaha milik desa Bangun Jaya.
10. Pelaksana Operasional adalah pelaksana operasional BUM Desa, yang ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.
11. Pengawas adalah pengawas BUM Desa, yang ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan desa ini dibentuk BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk beberapa unit usaha.
- (3) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Kepala Desa, dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari BPD.

Pasal 3

Sebutan nama BUM Desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Pengaturan terhadap BUM Desa juga diberlakukan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi, yang merupakan ciri dari system ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) BUM Desa berkedudukan dan berkantor di Ibukota Pemerintahan Desa.
- (2) Atas Usul Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Pengawas, Pelaksana Operasional dapat membuka cabang atau Perwakilan diluar Ibukota Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tujuan pembentukan BUM Desa adalah:
 - a. tercapainya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh untuk:
 1. meningkatkan sumber pendapatan asli desa.
 2. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.
 - b. meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat.

- (2) Fungsi BUM Desa adalah mengelola badan usaha yang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan ikut menciptakan iklim usaha yang kondusif di desa.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha

Pasal 7

- (1) BUM Desa bergerak dalam bidang usaha:
- a. perdagangan hasil pertanian meliputi:
 1. tanaman pangan;
 2. perkebunan;
 3. peternakan;
 4. perikanan;
 5. Hortikultura, dan
 5. agrobisnis.
 - b. produksi dan pemasaran, meliputi:
 1. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi desa;
 2. industri kecil dan kerajinan rakyat
 - c. usaha jasa, meliputi:
 1. simpan pinjam;
 2. Foto copy, percetakan, dan ATK
 3. permodalan;
 4. listrik desa dan yang sejenisnya.
- (2) Bidang kegiatan selain yang disebut pada ayat (1) dan belum diusahakan oleh BUM Desa dapat dikelola dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Pengawas.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN MODAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pembentukan BUM Desa harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. usaha tersebut dibentuk untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. usaha tersebut merupakan pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
 - c. usaha didirikan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dengan peraturan desa;
 - d. usaha dapat berbentuk lembaga dan atau badan sesuai kebutuhan;
 - e. sebutan nama lembaga dan atau badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;

- f. fungsi lembaga dan atau badan dapat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. kepemilikan Saham berasal dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 - c. adanya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa;
 - d. adanya animo dan perhatian masyarakat desa terhadap pemberdayaan ekonomi desa;
 - e. adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/unit-unit usaha produktif masyarakat;
 - f. adanya kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
 - g. tersedianya sumberdaya manusia dalam mengelola badan usaha dan merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor, mayoritas dimiliki Pemerintah Desa.
- (2) Modal usaha terdiri dari modal dasar dan bantuan.
- (3) BUM Desa dapat menerima tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. modal bantuan berasal dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah;
 - b. modal pinjaman berasal dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat;
 - c. modal penyertaan berasal dari pihak ketiga atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan;
 - d. tabungan masyarakat.
- (4) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan d, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD.
- (5) Nilai nominal Modal Dasar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Modal BUM Desa disetor penuh ke dalam Kas BUM Desa secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Desa dan penyerta modal lainnya.

BAB V
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 10

- (1) BUM Desa dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Operasional dan dapat dibantu oleh beberapa orang Wakil Ketua yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas bidang masing-masing.
- (2) Ketua Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bilamana Ketua berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua yang tertua dalam jabatannya dan/atau yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja uraian tugas Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Ketua mewakili badan usaha di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Ketua dapat memberikan kuasa mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang Wakil Ketua yang ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang pegawai BUM Desa, baik secara sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan Pelaksana Operasional:

- a. warga desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
- b. memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. bertempat tinggal (domisili) di tempat kedudukan Badan Usaha paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak diperkenankan merangkap jabatan pada pemerintahan desa atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BUM Desa;
- e. tidak diperbolehkan dari pegawai negeri sipil (PNS);
- f. berumur paling tinggi 60 (enam puluh tahun);
- g. tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan Negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha;
- h. mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan/atau pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. tidak boleh ada hubungan keluarga antara anggota Pelaksana Operasional sampai dengan derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (perkawinan);
- j. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada BUM Desa yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pelaksana Operasional:
 - a. pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Desa atas usul Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
 - b. pelaksana operasional yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kali apabila dari jabatan Anggota menjadi Ketua dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tahun sejak saat diangkatnya;
 - c. gaji Pelaksana Operasional dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
 - d. Sebelum melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional disumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Operasional diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan badan usaha.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa dan/atau kepentingan desa, dan/atau kepentingan daerah;
 - d. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak dapat memajukan dan mengembangkan badan usaha;
 - f. berakhirnya masa jabatan sebagai Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - g. pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan Pelaksana operasional yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pelaksana Operasional yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3) Selama tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diputuskan, kepala Desa atas usul Pengawas dapat memberhentikan Pelaksana Operasional yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Ketua Pelaksana Operasional, maka atas usul Pengawas, dapat ditunjuk salah seorang Anggota Pelaksana Operasional untuk melaksanakan tugas Ketua sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Kepala Desa tentang hal tersebut.

- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberhentian sementara tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian Pelaksana Operasional dimaksud pada ayat 2 (dua), maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Pelaksana Operasional yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas dan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada Pelaksana Operasional yang bersangkutan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Syarat-syarat Anggota Pengawas:
- a. warga Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
 - b. memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. bertempat tinggal (domisili) di tempat kedudukan badan usaha paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. berumur paling tinggi 60 (enampuluh) tahun;
 - e. tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan Negara dan tindakan yang tercela di bidang usaha;
 - f. mempunyai pengalaman dalam pengawasan perusahaan dan atau pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. tidak boleh ada hubungan keluarga dengan anggota Pelaksana Operasional sampai dengan derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (perkawinan);
 - h. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada badan usaha yang berada dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat pengangkatan Pengawas:
- a. pengawas diangkat oleh Kepala Desa atas usul BPD untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
 - b. apabila telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pengawas dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga kali apabila dari jabatan anggota menjadi Ketua dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enampuluh) tahun sejak saat diangkatnya.
- (2) Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh badan usaha dengan persetujuan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, pengawas disumpah dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (5) Ketua Pengawas diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengawasan badan usaha.

Pasal 17

- (1) Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Desa meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa dan/atau kepentingan desa, dan/atau kepentingan daerah;
 - d. sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. berakhirnya masa jabatan sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - f. pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilaksanakan, Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3) Selama tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diputuskan, Kepala Desa atas usul BPD, dapat memberhentikan Pengawas yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Ketua Pengawas, maka atas usul BPD, dapat ditunjuk salah seorang Anggota Pengawas untuk melaksanakan tugas Ketua sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Kepala Desa tentang hal tersebut.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pemberhentian Pengawas dimaksud pada ayat (2), maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas dan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal ini harus diberitahukan kepada Pengawas yang bersangkutan.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 18

- (1) Tahun Buku BUM Desa berdasarkan Tahun Takwim (Masehi).
- (2) Tiap-tiap tahun buku, Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disampaikan kepada Pengawas untuk dijadikan bahan dalam Rapat paling lama 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berjalan berakhir untuk mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB IX ANGGARAN USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila Pengawas mengajukan keberatan atas RKA Tahunan yang diajukan, maka diberlakukan anggaran pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan harus mendapat persetujuan dari Pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB X PEMBUBARAN/LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Dalam likuidasi, Penyerta Modal bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena Neraca Perhitungan Rugi/Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- (4) Semua kekayaan BUM Desa setelah diadakan Likuidasi, dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Desa setelah memerhitungkan hak dan kewajiban Penyerta Modal.
- (5) Semua hak karyawan BUM Desa setelah diadakan likuidasi diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

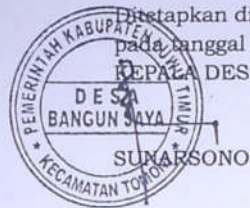
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bangun Jaya.



Ditetapkan di : Bangun Jaya
pada tanggal : 02 Mei 2016
KEPALA DESA BANGUN JAYA,

Diundangkan di : Bangun Jaya
pada tanggal : 02 Mei 2016
SEKRETARIS DESA BANGUN JAYA,

SUWITO
LEMBARAN DESA BANGUN JAYA TAHUN 2016 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
DESA BANGUN JAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN JAYA
NOMOR : 33/DB/IX/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa)
DESA BANGUN JAYA

KEPALA DESA BANGUN JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Bangun Jaya Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes " HARAPAN ";

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DESA BANGUN JAYA
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut BUM Desa " HARAPAN " sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 3 (Tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini , dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bangun Jaya
Pada Tanggal : 21 September 2016



- Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
 2. Kepala BPMPD Luwu Timur di Malili;
 3. Camat Tomoni di Mandiri;
 4. BPD Bangun Jaya di Bangun Jaya;
 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 33/IX/ TAHUN 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SURATMAN	MANAGER	
2	SRI BUNIATI	BENDAHARA	
3	SITI SUKARTIYAH	UNIT PEMASARAN	PRODUKSI & PEMASARAN
4	RAHMAWATI	UNIT SIMPAN PINJAM	USAHA JASA
5	LAHIRI SULA SUDI R.	UNIT FOTO COPY DAN PERCETAKAN	USAHA JASA
6	DWI MILIANTO	UNIT PENCUCIAN MOTOR DAN PERBENGKELAN	USAHA JASA

Ditetapkan Di : Bangun Jaya
Pada Tanggal : 21 September 2016

Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI

DESA BANGUN JAYA

Jl. Poros Cendana Hitam Nomor. 21, Kode Pos 91972

**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL USAHA DARI
PEMERINTAH DESA BANGUN JAYA KEPADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
BUM Desa "HARAPAN" DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI**

NO : 065/DB/XII/2016

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas Bertempat di Kantor Desa Bangun Jaya, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sunarsono
Jabatan : Kepala Desa Bangun Jaya
Alamat : Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu secara sah mewakili Pemerintahan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Suratman
Jabatan : Manager BUM Desa "HARAPAN"
Alamat : Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur

Dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Bantuan Dana Penyertaan Modal BUM Desa "HARAPAN" dari Pemerintah Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak KESATU telah menyerahkan Bantuan Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai Dana Penyertaan Modal Awal BUM Desa "HARAPAN".

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Pihak KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana tersebut Kepada Pemerintah Desa Bangun Jaya selambat-lambatnya 1 Bulan setelah Dana tersebut diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini Kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SAKSI-SAKSI :



Bangun Jaya, 29 Desember 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DASIMAN	Ketua BPD	1
2.	MANAN	Kepala Dusun	2
3.	A.KUSNO	Tokoh Masyarakat	3

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI

DESA BANGUN JAYA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN PEMERINTAH DESA BANGUN JAYA

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : SUNARSONO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
Dalam hal ini dan atas nama Kepala Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni yang berkedudukan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SURATMAN
Jabatan : Manager BUMDesa "HARAPAN"
Alamat : Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama BUMDesa "HARAPAN" yang berkedudukan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Usaha dibawah naungan Pemerintah Desa Bangun Jaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal penyertaan modal Pemerintah Desa Bangun Jaya yang menunjang unit usaha BUM Desa.
2. Hal di atas bertujuan meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PAD).

Pasal 2

Penyertaan Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal I Ayat 1 dan 2 adalah sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
2. Modal PIHAK PERTAMA tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA secara langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	29 – 12 2016	Rp.100.000.000,-	-
JUMLAH		Rp.100.000.000,-	-

Pasal III
Pengelolaan Usaha

1. PIHAK KEDUA sanggup bekerja mengelola usaha
2. Selama pengelolaan usaha, maka PIHAK PERTAMA memfasilitasi dan mendampingi PIHAK KEDUA dalam menjalankan kegiatannya.
3. Pengelolaan Usaha yang di jalankan oleh PIHAK KEDUA yakni Simpan Pinjam, Foto Copy, Pencucian Motor dan barang dagangan.
4. Dalam mengelola usahanya, PIHAK KEDUA dibantu oleh sejumlah staf yang semuanya berstatus sebagai pengurus kelompok.

Pasal IV
Keuntungan

1. Keuntungan adalah, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha
2. Keuntungan Usaha diperoleh dari kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Foto Copy maupun barang dagangan.
3. Keuntungan usaha (*Profit Brutto*) adalah total jumlah keuntungan usaha tanpa dikurangi biaya operasional.
4. Keuntungan bersih (*Profit Netto*) adalah keuntungan setelah dikurangi biaya operasional.

Pasal V
Laporan Usaha

1. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap bulan
2. Laporan bulanan terinci mengenai seluruh kegiatan usaha dikirimkan paling lambat 10 hari pada bulan berikutnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

Pasal VI
Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu kerjasama, PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan kewajiban
 - a. Melakukan Fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap kegiatan PIHAK KEDUA secara keseluruhan.
 - b. Memberikan usul, saran kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan
 - c. Pemeriksaan dan monitoring terhadap kegiatan PIHAK KEDUA secara periodik.
 - d. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan dana sesuai Pasal IV dan telah diatur dalam AD/ART
 - e. Tidak akan mengambil modal usaha yang sudah di serahkan dan akan menambah Modal setiap Tahunnya, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
2. Selama jangka waktu kerjasama, PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban Untuk :
 - a. Mengelola modal usaha yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan.
 - b. Membuat laporan secara periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang terjadi ketika kegiatan usaha sedang berjalan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 X 24 Jam setelah kejadian.
 - d. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha
 - e. Mengikuti Aturan / Juknis yang berlaku pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku PIHAK PERTAMA

Pasal VII

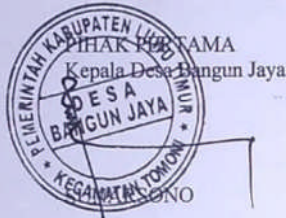
KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal VIII

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
DESA BANGUN JAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN JAYA
NOMOR : 23 / DB / XII / 2016

TENTANG

BANTUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BUM Desa
"HARAPAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGUN JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Usaha Badan Usaha Milik Desa "HARAPAN", perlu memberikan bantuan penyertaan Modal Pemerintah Desa Bangun Jaya kepada Badan Usaha Milik Desa "HARAPAN".
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Bantuan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

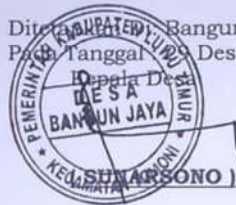
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan: (3/2015).
11. Peraturan Desa Bangun Jaya Nomor 05/DB/IX/2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "HARAPAN".
12. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Bantuan Dana Penyertaan Modal kepada Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "HARAPAN" sebagai Pengelola Unit-Unit Usaha di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Dana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk tunai dari Pemerintah Desa Bangun Jaya kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa Kecamatan "HARAPAN" Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangun Jaya
Pada Tanggal Desember 2016



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala BPMPD Luwu Timur di Malili;
3. Camat Tomoni di Mandiri;
4. BPD Bangun Jaya di Bangun Jaya;
5. Arsip.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ HARAPAN “
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Harapan merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) BUM Desa Harapan yang berlaku, oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dimaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGURUS BUM DESA HARAPAN

Pasal 2

Susunan organisasi BUM Desa Harapan terdiri dari :

- a. Penasihat.
- b. Pelaksana operasional.
- c. Pengawas.

Pasal 3

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara otomatis oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berfungsi mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG PENASIHAT, PENGURUS DAN
PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif;
 - b. menggunakan fasilitas, sarana prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk mendukung kelancaran pengelolaan BUM Desa Harapan.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Harapan;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Harapan;

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Harapan.
- (3) Penasihat berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Harapan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Harapan.
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Harapan agar menjadi lembaga mampu melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Harapan.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Masa bakti Penasihat/Komisaris selama masih menjabat Kepala Desa;
- (2) Masa bakti Pelaksana Operasional selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan; dan
- (3) Masa bakti Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa;
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUM Desa Harapan meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa meliputi :
 1. simpan pinjam;
 2. Fotocopy dan percetakan; dan
 3. ATK.
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi :
 1. perkebunan;
 2. pertanian;
 3. peternakan;

4. agribisnis dan hortikultura; dan
 5. industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (2) Pengembangan usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUM Desa Harapan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi/hukuman/pidana.
- (2) sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 meliputi :
 - a. keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu/dan atau jatuh tempo yang ditentukan dikenakan denda keterlambatan sebesar %/bulan dari total pinjaman;
 - b. apabila pemanfaat pinjaman tidak dapat membayar angsuran atau mengembalikan pinjaman sesuai jumlah pokok pinjaman ditambah bunga, dapat dilakukan sita barang sesuai nilai pokok pinjaman ditambah bunga (yang diakumulasikan setiap bulanketerlambatan);
 - c. dalam hal nasabah /pemanfaat pinjaman sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada huruf a dan b serta sengaja menghindar atau melarikan diri dari tanggung jawab, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan sesuai . hukum yang berlaku;
 - d. kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah/pemanfaat pinjaman.

Pasal 11

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUMDes Harapan.
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum :
 - a. Jasa keuangan sebesar 15 % per tahun dengan angsuran pokok selama 11 bulan;
 - b. Jasa peternakan sebesar 25 %, dihitung dari keuntungan penjualan;
 - c. Jasa unit usaha lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen.

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 12

Permodalan, keuangan, dan harta benda BUM Desa Harapan, dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes;
- b. Tabungan masyarakat;

- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBDes;
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta; dan
- e. Hasil usaha.

Pasal 13

- (1) Modal BUM desa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dapat berupa dana hibah/bantuan.

BAB IX KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian melalui musyawarah BUM Desa.

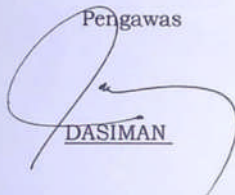
Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Harapan ini ditetapkan oleh pengelola BUM Desa yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Bangun Jaya
Pada tanggal : 07 Maret 2016

PENGURUS BUM Desa Harapan

1. SUNARSONO	Komisaris
2. SURATMAN	Manager
3. RAHMAWATI	Sekretaris
4. SRI BUNIATI	Bendahara
5. SITI SUKARTIAH	Unit Pemasaran
6. LAHIRI SULA SUDI RAHAYU	Unit Usaha

Mengetahui,

Pengawas

DASIMAN



KABUPATEN : LUWU TIMUR
Nomor Perda BUMDesa : 03 Tahun 2015
DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017

No	Kecamatan/Desa	Nama BUMDesa	Tahun Berdiri	No. Dan Tgl Perdes	Jumlah Modal Awal	Jumlah Modal saat ini	LED yg Tergabung	Unit Usaha	Pengurus	Nomor dan Tgl SK Pengurus BUMDesa	Kontak Person	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I KECAMATAN TOMONI												
1	Bangun Jaya	Harapan	2016	No. 05 Tahun 2015	Rp 100,000,000			1. Simpan pinjam 2. Foto copy & ATK	1. Direktur : Suratman 2. Sekretaris : Rahmawati 3. Bendahara : Sri Pujiawati	Nomor 33/DB/IX/2016, Tanggal 21 sep 2016	085 200 636 171	
2	Mandiri	Mitra Mandiri	2016	No. 07 Tahun 2016	Rp 20,000,000			1. Cetak batako 2. Pengelasan 3. Perkebunan 4. Jahit atap 5. Tagihan listrik	1. Direktur : Adris Razak 2. Sekretaris : Siswanto 3. Bendahara : Ilin Kumiasih	Nomor 37 Tahun 2016, Tanggal 09 Nov 2016	081 241 884 899	
II KECAMATAN MALILI												
3	Laskap	Maju Bersama	2016	No. 03 Tahun 2016	Rp 350,000,000			1. Jahit Menjahit/Bordir	1. Direktur : Firman Udding 2. Sekretaris : salman Asmaul Husna 3. Bendahara : Saparuddin, S.Sos	3- Kep/Ds.Laskap/2016, 07 Nov 2016	08123095 6105	
4	Manurung	Manurung Mandiri	2016	No. 03 Tahun 2014	Rp 60,000,000			1. Simpan pinjam 2. Penjualan 9 bahan pokok 3. Perkebunan dan pertanian	1. Direktur : Amiruddin Budiman 2. Sekretaris : Nurhijjah 3. Bendahara : Hengriawan	Nomor 05 Tahun 2015, tanggal 06 april 2015	08124225 6457	
5	Balantan	Karya Sipatuo	2016	No. 21 Tahun 2016	Rp 50,000,000			1. Usaha penjualan 9 bahan pokok 2. Usaha sewa	1. Direktur : Hengriawan 2. Sekretaris : Hasriandi	Nomor 21 Tahun	085255 056267	

Nomor Perda BUMDesa : 03 Tahun 2015

[illegible]

DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017

KABUPATEN : LUWU TIMUR

Nomor Perda BUMDesa : 03 Tahun 2015

V KECAMATAN TOMONI TIMUR

10	Kertoh arjo	Kartadana	2016	No. 04 Tahun 2016	Rp 100,000,000				1. Usaha pertanian dan perkebunan 2. Usaha simpan pinjam 3. Usaha perdagangan dan jasa	1. Direktur: Putu Ariatra 2. Sekretaris: omang Satriawikan 3. Bendahara: Putu Rudani	Nomor 35 tahun 2016, Tanggal 22 okt 2016	08569677 0954
----	-------------	-----------	------	-------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------

VI KECAMATAN TOWUTI

11	Wawo ndula	Karya sejahtera mandiri	2016	No. 11 tahun 2016	Rp 50,000,000				1. Usaha pengelola pasar 2. Usaha pengelola sampah 3. Usaha pengelola BLM PUAP 4. Usaha jasa konstruksi 5. Usaha jasa pertanian	1. Direktur: Denny Patandung 2. Sekretaris: Rosalina Iskandar 3. Bendahara: Rosdiana	Nomor 30 Tahun 2016, tanggal 30 Nov 2016	08525592 5480
12	Baruga	Pioneer	2016	No. 01 Tahun 2017	Rp 15,000,000				1. Simpan pinjam 2. Usaha pengelolaan sampah 3. Usaha pengelola BLM PUAP 4. Usaha jasa konstruksi 5. Usaha jasa pertanian	1. Direktur: Idawati Syamsir 2. Sekretaris: Firiani Rahman 3. Bendahara: Novaria Bela'	Nomor 09 Tahun 2017, Tanggal 01 Maret 2017	08135570 4922
13	Loeha	Loeha Jaya	2017	No. 03 Tahun	Rp 50,000,000				1. Usaha pertanian dan	1. Direktur: Atri Karim 2. Sekretaris:	Nomor 14 Tahun 2017,	

DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017

KABUPATEN : LUWU TIMUR

Nomor Perda BUMDesa : 03 Tahun 2015

					2016					perkebunan 2. Usaha sewa menyewa 3. Usaha pinjam pinjam	Samsul Bahri 3. Bendahara: Hardianti	Tanggal 13 maret 2017	
14	Bantila ng	Harapan Jaya	2016	No. 29 tahun 2016	Rp 30.000.000					1. Usaha pertanian dan perkebunan 2. Usaha sewa menyewa 3. Usaha simpan pinjam	1. Direktur: Drs. Jasman 2. Sekretaris: Harmayani, S.Pd 3. Bendahara : Sapidah	Nomor 27/DBT/SK - BUMDES/ VII/Tahun 2016 tanggal 07	08524296 6176
15	Tokali mbo	Bintang Pesisir		No 12 Tahun 2016						1. Pembuatan kompos 2. Perbengkelan 3. Simpan pinjam	1. Direktur : Norman 2. Sekretaris: Jhony P 3. Bendahara: Intan Mayasari	Nomor 12 tahun 2016	
VIII	KECAMATAN MANGKUTANA												
16	Balei Kemba ng	Kembang Abadi	2016	No 06 tahun 2016						1. Usaha pencucian mobil 2. Usaha pertanian 3. Usaha persewaan tenda pesta	1. Direktur : Haryanto Saad 2. Sekretaris: Obed 3. Bendahara: Sulamit	Nomor 40 Tahun 2016, tanggal 21 Desemb er	085211 699019
17	Kasint uwu	Sintuwu Raya	2017	No 03 Tahun 2017						1. Simpan pinjam 2. Usaha industri rumah tangga 3. Usaha sewa menyewa	1. Direktur : Era R 2. Sekretaris: takwa 3. Bendahara: Marian Yosepa	Nomor 75 Tahun 2017 Tanggal 24	082187 434472

DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017

KABUPATEN : LUWU TIMUR
 Nomor Perda BUMDesa : 03 Tahun 2015

18	Maleku	sehati	2017	No 03 Tahun 2017						1. Simpan pinjam 2. Perdagangan dan lumbung pangan 3. Sarana produksi pertanian	1. Direktur : Nikanor Matasak, Sos 2. Sekretaris: Aleksander Sitohang 3. Bendahara: Darna, SE	Nomor 06 Tahun 2017, tanggal 06 Maret 2017	081529 912855	
19	Sindu Agung	Amanah	2016	No 09 Tahun 2016						1. Jual beli hasil bumi 2. Jual oleh-oleh khas sindu agung 3. Jual pupuk organik	1. Direktur : Anggi Anggodo 2. Sekretaris: Puji Utami 3. Bendahara: Yulianti	Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 05 Januari 2017	085396 779081	
VIII	KECAMATAN KALAENA													
20	Sumbe r Agung	Abdi Masyarakat	2016	No 05 Tahun 2016						1. Simpan pinjam 2. Percetakan 3. Usaha jasa hiburan 4. Usaha pertanian dan perikanan	1. Direktur : Wayan Sunarto 2. Sekretaris: Santi 3. Bendahara: Made Surani	Nomor 37 Tahun 2016, Tanggal 04 November 2016	085299 412729	
21	Argomulyo	Karya Mulya	2016	No 03 Tahun 2016						1. Simpan pinjam 2. Usaha pertanian dan perkebunan	1. Direktur : Nurman Ade Supto 2. Sekretaris: Suroyo 3. Bendahara: Wiya Putri	Nomor 36 Tahun 2016, tanggal 07 November	082345 350244	

SAHA MILIK DESA (BUMDES)
BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2017

Catatan : Saldo tunai Pada bulan ini Adalah Rp. 5.797.701
Pendapatan / Jasa Pada Bulan ini Adalah Rp. 1.076.464

DIREKTUR BUNDES

SURATMAN

SUNARSONO

BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2017

NO	TGL/BLN/THN	URAIAN	PEMASUKAN			PENGELUARAN				HONOR PENGURUS	SALDO	
			MODAL AWAL	MODAL AWAL	JASA	TARIK DARI REKENING	INVENTARIS	BELI ATK DLL	SETOR KE REKENING			LAIN_LAIN
	01/05/2017	Saldo Pada bulan lalu	-	37.288.982	6.078.246	-	70.591.426	30.967.074	9.850.000	13.995.000	3.400.000	5.797.701
	17/05/2017	Pembayaran listrik Bumdes						103.000				5.694.701
	30/05/2017	Pendapatan Kue			22.500							5.717.201
	30/05/2017	Hasil penjualan listrik		4.223.000	141.300							10.081.501
	30/05/2017	Hasil penjualan Minuman & Snack		1.275.429	311.571							11.668.501
	30/05/2017	Beli Saldo Listrik						5.370.000				6.298.501
	31/05/2017	Hasil Foto Copy		75.000	50.000							6.423.501
	31/05/2017	Hasil Penjualan ATK		332.000	250.000							7.005.501
	31/05/2017	Transaksi sampai dengan bulan ini		5.905.429	775.371							7.005.501
	31/05/2017	Kumulatif transaksi s/d bulan ini	100.000.000	43.194.411	6.853.617		70.591.426	36.440.074	9.850.000	13.995.000	3.400.000	7.005.501

Catatan : Saldo tunai Pada bulan Ini Adalah Rp. 7.005.501
Pendapatan / Jasa Pada Bulan Ini Adalah Rp. 775.371

Bangun Jaya 31 Mei 2017

KOMISARIS BUMDES
KEPALA DESA

DIREKTUR BUNDES

DI BUAT OLEH
BENDAHARA BUMDES

SUNARSONO

SURATMAN

SRI BUNIATI

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2017**

NO	TGL/BLN/THN	URAIAN	PEMASUKAN			PENGELUARAN				HONOR PENGURUS	SALDO
			MODAL AWAL	MODAL AWAL	JASA	TARIK DARI REKENING	INVENTARIS	BELI ATK D/L	SETOR KE REKENING	LAIN_LAIN	
	01/03/2017	Saldo Pada bulan lalu	100.000.000	21.191.626	3.355.682	-	70.591.426	17.739.574	6.900.000	11.650.000	5.500.281
	03/03/2017	Setor ke Rek. BUMDES							2.950.000		2.550.281
	13/03/2017	Hasil Penjualan ATK		859.776	339.244						3.749.301
	15/03/2017	Hasil penjualan Minuman/ Snack		2.709.144	732.856						7.191.301
	17/03/2017	Belanja barang ATK dan Snak						3.202.000			3.989.301
	20/03/2017	Beli lain-lain/Bambu								2.000.000	1.989.301
	20/03/2017	Pendapatan kue			85.000						2.074.301
	22/03/2017	Pendapatan Foto Copy		210.000	361.000						2.645.301
	23/03/2017	Hasil Penjualan Listrik		4.547.000	128.000						7.320.301
	29/03/2017	Beli Saldo						3.485.000			3.835.301
	30/03/2017	Biaya pembayaran listrik BUMDES						106.000			3.729.301
	30/03/2017	Biaya Service foto copy						300.000			3.429.301
	30/03/2017	Biaya baleho								345.000	3.084.301
	31/03/2017	Transaksi sampai dengan bulan ini		8.325.920	1.646.100		-	7.093.000	2.950.000	2.345.000	3.084.301
	31/03/2017	Kumulatif transaksi s/d bulan ini	100.000.000	29.517.546	5.001.782		70.591.426	24.832.574	9.850.000	13.995.000	3.084.301

Bangun Jaya 31 Maret 2017

3.084.301
1.646.100

Catatan : Saldo tunai Pada bulan ini Adalah Rp.
Pendapatan / Jasa Pada Bulan Ini Adalah Rp.

DI BUAT OLEH
BENDAHARA BUMDES

DIREKTUR BUMDES

KOMISARIS BUMDES
KEPALA DESA

SRI BUNIATI

SURATMAN

SUNARSONO

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BUKU KAS UMUM
BULAN FEBRUARI 2017**

NO	TGL/BLN/THN	URAIAN	PEMASUKAN			PENGELUARAN				HONOR	SALDO
			MODAL AWAL	MODAL AWAL	JASA	TARIK DARI REKENING	INVENTARIS	BELI ATK DLL	SETOR KE REKENING	LAIN_LAIN	
1	01/02/2017	Saldo Pada bulan lalu	100.000.000	12.915.924	2.195.789		70.591.426	13.916.574	1.700.000	10.400.000	13.121.686
3	01/02/2017	Bayar 2 Orang pengurus									11.721.686
5	06/02/2017	Belanja Barang ATK Dan Snack						3.653.000			8.068.686
7	08/02/2017	Beli baju olah raga 5 pasang								1.250.000	6.818.686
9	10/02/2017	Pembayaran Listrik BUMDES						158.000			6.976.686
11	26/02/2017	Setor kerek.Bumdes							5.200.000		1.776.686
13	28/02/2017	Hasil Penjualan ATK		281.484	282.385						2.340.555
15	28/02/2017	Hasil Penjualan Minuman /Snack		1.663.218	356.990			12.000			4.360.763
17	28/02/2017	Beli Buku ADM									4.348.763
19	28/02/2017	Hasil Penjualan Pulsa Listrik		3.379.000	112.518						7.840.281
21	28/02/2017	Pendapatan dan Foto Copy		102.000	408.000						8.350.281
23	28/02/2017	Beli saldo		2.850.000							5.500.281
	28/02/2017	Transaksi sampai dengan bulan ini		8.275.702	1.159.893		-	3.823.000	5.200.000	1.250.000	5.500.281
	28/02/2017	Kumulatif transaksi s/d bulan ini	100.000.000	21.191.626	3.355.682		70.591.426	17.739.574	6.900.000	11.650.000	5.500.281

Catatan : Saldo tunai Pada bulan Ini Adalah Rp. 5.500.281
Pendapatan / Jasa Pada Bulan Ini Adalah Rp. 1.159.893

KOMISARIS BUMDES
KEPALA DESA

DIREKTUR BUMDES

DI BUAT OLEH
BENDAHARA BUMDES

SUNARSONO

SURATMAN

SRI BUNIATI

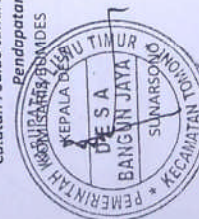
Bangun Jaya 28 Februari 2017

BULAN JANUARI 2017

Bangun Jaya 30 Januari 2017

Pendapatan / Iasa Pada Bulan Ini Adalah Rp 2.195.789

SEKRETUR BUNDES
SURATMAN



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2016**

NO	TGL/BULN/THN	URAIAN	PEMASUKAN			PENGELUARAN				SALDO
			MODAL AWAL	TARIK DARI BEK	PENJUALAN	JASA	INVENTARIS	BELI ATK DLL	SETOR KE BEK	LAIN LAIN
1	01/12/2016	Modal awal	100.000.000							100.000.000
2	05/12/2016	Beli 1 Buah Mesin Foto Copy					57.000.000			43.000.000
3	07/12/2016	Beli 1 Buah Kulkas					4.000.000			39.000.000
4	08/12/2016	Beli 1 Buah Lemari Kaca					2.000.000			37.000.000
5	08/12/2016	Pasang Instalasi Listrik							5.000.000	32.000.000
6	09/12/2016	Biaya servis foto copy							2.500.000	29.500.000
7	10/12/2016	Beli 1 Buah Rak Makanan Ringan					500.000			29.000.000
8	10/12/2016	Beli Modal Saldo Listrik						862.574		28.137.426
9	10/12/2016	Beli Hp/Print					2.937.426			25.200.000
10	10/12/2016	Beli 1 Buah pemotong Kertas					270.000			24.930.000
11	10/12/2016	Beli 1 Buah Hekter Besar					600.000			24.330.000
12	11/12/2016	Beli Papan Nama Bumdes							2.900.000	21.430.000
13	11/12/2016	Hasil Penjualan ATK								21.430.000
14	11/12/2016	Belanja Perfkengkan ATK			312.953	123.547				21.866.500
15	11/12/2016	Belanja Snack						3.000.000		18.866.500
16	15/12/2016	Hasil Jual Snack			135.000			1.000.000		17.866.500
17	17/12/2016	Hasil Penjualan Saldo Listrik			862.574					18.947.234
18	17/12/2016	Hasil penjualan Snack dan Minuman			2.061.500	382.416				21.391.150
30/12/2016		Transaksi sampai dengan bulan ini	100.000.000		3.372.027	589.123	67.307.426	4.862.574		21.391.150
30/12/2016		Kumulatif transaksi s/d bulan ini	100.000.000		3.372.027	589.123	67.307.426	4.862.574	10.400.000	21.391.150

Saldo tunai Pada bulan ini Adalah Rp. 21.644.574

DIREKTUR BUMDES

Bangun Jaya 30 Desember 2016
DI BUAT OLEH
BENDAHARA BUMDES



SURATMAN

KARTU INVENTARIS RUANGAN

KABUPATEN : LUWU TIMUR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 UNIT : KECAMATAN TOMONI
 SATUAN KERJA : KANTOR DESA BANGUN JAYA
 RUANGAN : UPKD

NO	Nama Barang	Merk/Model	Nomor Seri Pabrik	Tahun Pembelian/ Pembelian	Nomor Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan Mutasi
1	2	3	4	5	6	7	8	Baik (B)	Kurang Baik	Rusak	12
1	MEJA	ACTIF		2011	02.06.04.01.10	1	450.000	Baik (B)			
2	KURSI	FRONTLINE		2011	02.06.02.01.66	4	490.000	Baik (B)			
3	LEMARI	ACTIF		2012		1	650.000	Baik (B)			
4	KIPAS ANGIN	MIYAKO		2012	02.06.02.01.66	1	300.000	Baik (B)			
5	KURSI	VERTU		2014	02.06.04.01.10	3	400.000	BAIK(B)			



Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan Tenaga Ahli TTAG Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan kepala Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni



Wawancara dengan Manager BUM Desa “Harapan” Desa Bangun Jaya



Wawancara bersama Kepala Desa Tarengge, Kec. Wotu



Wawancara dengan anggota BPD Desa Tarengge, Kec. Wotu



Struktur Pengurus BUM Desa "Harapan" Desa Bangun Jaya





BUM Desa "Harapan" Desa Bangun Jaya

